Sasaran Daerah		RKPD Tahun 2026				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Pendukung**	**Indikator Kinerja Program (Indikator Hasil Program)**	**Lokasi**	**PD Penanggung Jawab**
				mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Indeks Desa	PD 4: Pembangunan desa berbasis potensi kewilayahan dan pemberdayaan kelembagaan desa yang berkualitas	Program Penataan Desa	Rata-rata Nilai Dimensi Aksesibilitas Desa	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar Desa	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rata-rata Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (PKK, LPMK, BPD, Posyandu, karangtaruna)	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka	PD 5: Akselerasi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sasaran Daerah		RKPD Tahun 2026				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Pendukung**	**Indikator Kinerja Program (Indikator Hasil Program)**	**Lokasi**	**PD Penanggung Jawab**
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Kajian Penanaman Modal yang siap dipromosikan	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan	(Rincian lokus per program tercantum	Dinas Penanaman Modal dan

Sasaran Daerah		RKPD Tahun 2026				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Pendukung**	**Indikator Kinerja Program (Indikator Hasil Program)**	**Lokasi**	**PD Penanggung Jawab**
				Standar Pelayanan	di Bab V)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang merata	Persentase Infrastruktur Wilayah terbangun	PD 7: Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan publik secara komprehensif, merata dan memadai	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan	Persentase	(Rincian lokus per	Dinas Pekerjaan

Sasaran Daerah		RKPD Tahun 2026				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Pendukung**	**Indikator Kinerja Program (Indikator Hasil Program)**	**Lokasi**	**PD Penanggung Jawab**
			Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	program tercantum di Bab V)	Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah layak huni untuk MBR	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di bawah 10 Ha	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan	Persentase	(Rincian lokus per	Dinas Perumahan

Sasaran Daerah		RKPD Tahun 2026				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Pendukung**	**Indikator Kinerja Program (Indikator Hasil Program)**	**Lokasi**	**PD Penanggung Jawab**
			Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	perumahan yang sudah dilengkapi PSU	program tercantum di Bab V)	Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya integrasi moda transportasi antar wilayah	Rasio konektivitas	PD 7: Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan publik secara komprehensif, merata dan memadai	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perhubungan
				Indeks keterlayanan trayek angkutan	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perhubungan
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK	PD 8: Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu air	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu udara	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang diolah	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman	Persentase Luasan ruang terbuka	(Rincian lokus per program tercantum	Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Daerah		RKPD Tahun 2026				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Pendukung**	**Indikator Kinerja Program (Indikator Hasil Program)**	**Lokasi**	**PD Penanggung Jawab**
			Hayati (KEHATI)	hijau Publik yang terkelola	di Bab V)	
				Persentase realisasi penambahan Wilayah Proklim	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana	PD 8: Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana	Program Penanggulangan Bencana	persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Sosial

Sasaran Daerah		RKPD Tahun 2026				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas Pendukung**	**Indikator Kinerja Program (Indikator Hasil Program)**	**Lokasi**	**PD Penanggung Jawab**
				Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota		
			Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	(Rincian lokus per program tercantum di Bab V)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.4.
Keterkaitan RKPD dengan TPB/SDG's

NO	ISU TPB	ISU KABUPATEN	TUJUAN SDG's	PRIORITAS DAERAH
1	• Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja • Infrastruktur • Kesenjangan kota dan permukiman • Sumberdaya kelautan • Ekosistem daratan • Energi	- Penguatan Sektor Unggulan Daerah yang Belum Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi - Pemenuhan infrastruktur pembangunan dan sarana prasarana yang merata, konsisten dan berkualitas	• Industri, Inovasi dan Infrastruktur • Berkurangnya Kesenjangan • Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab • Tanpa Kelaparan • Tanpa Kemiskinan • Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	PD 6: Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
2	• Kemitraan global • Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	- Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Berbasis Inovasi - Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan dan Sarana Prasarana yang Merata, Konsisten, dan Berkualitas - Peningkatan Kondusivitas Wilayah dan Penanganan Bencana	• Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh • Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	PD 9: Mewujudkan birokrasi yang profesional sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal yang efektif, akuntabel dan inklusif

NO	ISU TPB	ISU KABUPATEN	TUJUAN SDG's	PRIORITAS DAERAH
3	• Kesehatan • Pendidikan • Air Bersih dan Sanitasi • Gender • Kemiskinan • Pangan dan Gizi • Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja • Produksi dan konsumsi berkelanjutan • Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menghadapi Globalisasi - Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan dan Sarana Prasarana yang Merata, Konsisten, dan Berkualitas	• Pendidikan Berkualitas • Kehidupan Sehat dan Sejahtera • Kesetaraan Gender • Air Bersih dan Sanitasi Layak • Tanpa Kelaparan • Tanpa Kemiskinan • Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi • Berkurangnya Kesenjangan	PD 1: Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan yang maju dan Sejahtera PD 4: Pembangunan desa berbasis potensi kewilayahan dan pemberdayaan kelembagaan desa yang berkualitas
4	• Kemiskinan • Pangan dan Gizi • Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja • Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Pengentasan Kemiskinan dengan Perlindungan dan Ketahanan Sosial yang Adaptif Berbasis Kesetaraan Gender	• Pendidikan Berkualitas • Kehidupan Sehat dan Sejahtera • Kesetaraan Gender • Tanpa Kelaparan • Tanpa Kemiskinan • Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi • Berkurangnya Kesenjangan	PD 3: Peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) PD 2: Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, penguatan inklusi sosial dan

NO	ISU TPB	ISU KABUPATEN	TUJUAN SDG's	PRIORITAS DAERAH
				ketahanan keluarga
5	• Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja • Pendidikan • Gender • Kemiskinan • Produksi dan konsumsi berkelanjutan	- Kesenjangan antara Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Ketersediaan Tenaga Kerja Sesuai dengan Kompetensinya - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menghadapi Globalisasi	• Tanpa Kelaparan • Tanpa Kemiskinan • Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi • Kesetaraan Gender • Berkurangnya Kesenjangan	PD 5: Akselerasi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif
6	• Air Bersih dan Sanitasi • Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan • Infrastruktur • Kesenjangan kota dan permukiman • Produksi dan konsumsi berkelanjutan • Perubahan iklim	- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Wilayah yang Nyaman untuk Dihuni - Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan dan Sarana Prasarana yang Merata, Konsisten, dan Berkualitas - Peningkatan Kondusivitas Wilayah dan Penanganan Bencana	• Air Bersih dan Sanitasi Layak • Energi Bersih dan Terjangkau • Kota dan Permukiman Berkelanjutan • Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan • Penanganan Perubahan Iklim • Ekosistem Daratan • Ekosistem Lautan • Pendidikan Berkualitas	PD 7: Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan publik secara komprehensif, merata dan memadai PD 8: Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana

NO	ISU TPB	ISU KABUPATEN	TUJUAN SDG's	PRIORITAS DAERAH
			• Kehidupan Sehat dan Sejahtera • Industri, Inovasi dan Infrastruktur	

4.3.2. Keselarasan RKPD Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kendal tahun 2026 mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu, prioritas pembangunan juga mendukung prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional. Tema RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema pembangunan ini utamanya diwujudkan melalui prioritas nasional swasembada pangan, energi, dan air. Selain itu, prioritas nasional lain yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, adopsi teknologi dan inovasi, pertahanan semesta, fiskal adaptif, stabilitas makroekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Keselarasan dan dukungan terhadap nasional selain dengan prioritas nasional juga termasuk dukungan terhadap indikator sasaran prioritasnya. Gambaran keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.

Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Kabupaten Kendal dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan RKPD Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN KENDAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	KETERKAITAN
PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PD 1 Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan yang maju dan Sejahtera PD 9 Mewujudkan birokrasi yang konsisten sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal yang efektif, akuntabel dan inklusif	PP 1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PN 1, PD 1 & PD 9, PP 1
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian	PD 3 Peningkatan kualitas perlindungan sosial berbasis satu sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial	PP 2 Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PN 2, PD 3, PP 2

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KABUPATEN KENDAL		PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		KETERKAITAN
	Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		Ekonomi Nasional)			
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD 7 PD 5	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan publik secara komprehensif, merata dan memadai Akselerasi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	PP 3	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	PN 3, PD 7 & PD 5, PP 3
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PD 1 PD 2	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan yang maju dan sejahtera Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, penguatan inklusi sosial dan ketahanan keluarga	PP 3	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	PN 4, PD 1 & PD 2, PP 3
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD 6	Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah	PP 2	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PN 5, PD 6, PP 2
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan	PD 4	Pembangunan desa berbasis potensi kewilayahan dan pemberdayaan kelembagaan desa yang	PP 2	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PN 6, PD 4, PP 2

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KABUPATEN KENDAL		PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		KETERKAITAN
	Pemberantasan Kemiskinan		berkualitas			
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	PD 9	Mewujudkan birokrasi yang konsisten sebagai tulang punggung pembangunan Kabupaten Kendal yang efektif, akuntabel dan inklusif	PP 1	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PN 7, PD 9, PP 1
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD 8	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana	PP 1	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PN 8, PD 8, PP 1

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator utama pembangunan Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penyelarasan dalam penetapan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Kendal sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045. Penjabaran target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6.

Keterkaitan Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP 2026

NO	PRIORITAS NASIONAL RKP		SASARAN DAERAH RPJMD/RKPD	
	Uraian PN	Sasaran Pembangunan / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan	Indeks Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah (ISPKD) (Indikator Kinerja PD)
		Indeks HAM		
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan	Asia Power Index (*Military Capability*)		
		Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)		
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		
		Global Cybersecurity Index		
		Indeks Keamanan Laut Nasional		

NO	PRIORITAS NASIONAL RKP		SASARAN DAERAH RPJMD/RKPD	
	Uraian PN	**Sasaran Pembangunan / Indikator Kinerja**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**
	Ekonomi Biru	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Indeks ketahanan pangan (Indikator Kinerja PD)
		Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) (Indikator Kinerja PD)
		Indeks Ketahanan Energi		
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita)		
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang merata	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (Indikator Kinerja PD)
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang merata	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Indikator Kinerja PD)
		Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)		
		Indonesia Blue Economy Index (IBEI)		
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global		
		Indeks Ekonomi Hijau		
		Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Indikator Kinerja Kunci PD)
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Indikator Kinerja PD)
		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Komulatif
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Komulatif
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Cakupan RTH Publik yang terkelola (Indikator Kinerja PD)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	Stok Infrastruktur terhadap PDB		
		Total Aset Sektor Keuangan/PDB		
		Aset Perbankan/PDB		
		Aset Dana Pensiun/PDB		

NO	PRIORITAS NASIONAL RKP		SASARAN DAERAH RPJMD/RKPD	
	Uraian PN	Sasaran Pembangunan / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
	Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Aset Asuransi/PDB		
		Kapitalisasi Pasar Modal/PDB		
		Total Kredit/PDB		Total Kredit/PDB
		Inklusi Keuangan		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal		
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah		
		Rasio Kewirausahaan (%)	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	Rasio Kewirausahaan Daerah
		Rasio PDB Pariwisata (%)	Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	PAD sektor pariwisata (Indikator Kinerja PD)
		Devisa Pariwisata (miliar USD)	Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	PAD sektor pariwisata (Indikator Kinerja PD)
		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (tahun)	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke atas (Indikator Kinerja PD)
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Harapan Lama Sekolah (Indikator Kinerja PD)
		Rata-rata nilai PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains		
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Usia Harapan Hidup (Indikator Kinerja PD)
		Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	*Total Fertility Rate* (Indikator Kinerja PD)
		Angka Kematian Ibu (per	Meningkatnya	Angka Kematian Ibu

NO	PRIORITAS NASIONAL RKP		SASARAN DAERAH RPJMD/RKPD	
	Uraian PN	Sasaran Pembangunan / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
		100.000 kelahiran hidup)	pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	(per 100.000 kelahiran hidup)
		Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pembanguunan Keluarga (Ibangga)
		Indeks Perlindungan Anak	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pembangunan Pemuda
		Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Ketimpangan Gender
		Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pembangunan Gender
		Mobilitas Penduduk Lanjut Usia		
		Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas		
		Peringkat Indeks Inovasi Global		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Indikator Kinerja PD)
		Peringkat pada Asian Games		
		Peringkat pada Asian Para Games		
		Peringkat pada ASEAN Para Games		
		Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	Meningkatnya pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Pembangunan Olahraga
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan
		Biaya Logistik (% PDB)		
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing dan	Tingkat Kemiskinan

NO	PRIORITAS NASIONAL RKP		SASARAN DAERAH RPJMD/RKPD	
	Uraian PN	Sasaran Pembangunan / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
	Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		sejahtera	
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem		
		Proporsi Penduduk Kelas Menengah		
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	Meningkatnya angkatan kerja yang terampil dan kompeten	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal		
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang merata	Rumah tangga dengan akses hunian layak (Indikator Kinerja PD)
		Persentase desa mandiri (%)	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan desa dalam mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan	Persentase Desa Mandiri
		Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional		
		Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional		
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Indeks Pembangunan Hukum	Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan	Indeks Reformasi Hukum
		Indeks Persepsi Korupsi		
		Indeks Integritas Partai Politik		
		Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		
		Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)		
		Return on Asset (ROA) BUMN (%)		Return on Asset (ROA) BUMD (%)
		Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB		
		Rasio Perpajakan terhadap PDB	Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
		Tingkat Inflasi (%)		
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan	Indeks Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah (ISPKD)
		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan tabel persandingan indikator sasaran di atas, dapat dilihat adanya keselarasan antara sasaran pembangunan RKPD tahun 2026 dengan Prioritas Nasional tahun 2026. Dari 96 indikator sasaran

yang dipetakan per prioritas nasional tahun 2026, terdapat 46 indikator sasaran Pembangunan RKPD tahun 2026 yang terkait, sedangkan 50 indikator lainnya belum terpasang dalam RKPD. Jadi dapat disimpulkan bahwa 47,9% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran Prioritas Nasional RKP 2026.

Tabel 4.7.

Keterkaitan Prioritas Nasional dengan RKPD 2026

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
					Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
				Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/tanaman
					Peningkatan Kualitas SDG hewan/tanaman
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota
					Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Irigasi Usaha Tani
					Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan
					Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
					Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
					Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa
					Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
					Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan
					Pameran Dagang Nasional
					Peningkatan Citra Produk Ekspor
					Pameran Dagang Lokal
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat
				Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
					Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Kajian	Pemantauan dan Evaluasi KLHS

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
					Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
					Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Hidup (PPLH)	Daerah Kabupaten/Kota	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
					Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
					Rekonstruksi jalan
					Pemeliharaan berkala jalan
					Penggantian jembatan
					Pemeliharaan rutin jembatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
	Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				Pemeliharaan berkala jembatan
					Survey kondisi jalan/jembatan
					Rehabilitasi jalan
					Pemeliharaan rutin jalan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi check dam
					Operasi dan pemeliharaan sungai
					Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai
					Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota
					Rehabilitasi pintu air/bending pengendali banjir
					Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
					Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
					Penyediaan Unit pengolahan setempat
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
					Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
					Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
					Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
					Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang
					Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Koor.dinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
					Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Bencana Kabupaten/Kota
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
					Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
			Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
					Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Ulitilas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
					Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
					Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
			Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		DINAS PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Pelaksanaan Manajemen dan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
					Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Kabupaten Kota	
				Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
					Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
					Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
					Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
					Penyediaan Akses Internet
					Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media
					Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
					Pelayanan Informasi Publik
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					Penyusunan Konten
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pendidikan
					Pengembangan Sistem Pemasaran
					Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
					Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					untuk Pengembangan Pariwisata
					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					dan Utilitas Sekolah
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Pengadaan Mebel Sekolah
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
					Pembangunan Ruang Kelas Baru
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD
					Pengadaan Mebel PAUD
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
					Pengelolaan Dana BOP PAUD
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pendidikan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru
					Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
				Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
					Pembangunan Ruang Kelas Baru
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
				Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Pengembangan Puskesmas
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
					Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
					Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
					Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampat krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					masyarakat
					Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
					Pengelolaan Surveillans Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
					Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
					Operasional pelayanan Puskesmas
					Operasional pelayanan fasilitas keseharan lainnya
					Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
					Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
					Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					dengan HIV (ODHIV)
					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
					Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
					Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Jajanan
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan – Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyaraakat
				Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Daerah Kabupaten/Kota	
		DINAS SOSIAL	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
					Rujukan Anak-Anak Terlantar
					Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
				Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
					Pemberian Layanan Kedaruratan
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
					Pemberian Layanan Rujukan
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
					Penyediaan Permakanan
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
					Pemberian Layanan Rujukan
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
					Pelayanan Dukungan Psikososial
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaen/Kota
					Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
					Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
					Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
					Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota
					Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
					Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					Layanan pendampingan korban bagi Anak

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
					Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
					Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
					Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
					Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
			Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
					Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
					Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Keluarga	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota
					Keikutsertaan anggota kontingen

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
					Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
					Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
					Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
					Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
					Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
			Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
					Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
					Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
			Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
					Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Daerah Kabupaten/Kota
					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
					Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
					Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
					Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
					Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi
					Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
	Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	TERPADU SATU PINTU		Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penamanan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
					Pengawasan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
					Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
					Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
					Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
					Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Pengumpulan Data Kependudukan dan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Kependudukan	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
					Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
				Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pemilihan Arsiparis Teladan
			Prorgam Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
					Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				(Sepuluh) Tahun	Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
					Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
					Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
				Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
					Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
					Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pengelolaan Data Kepegawaian
				Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
					Pengelolaan Promosi ASN
				Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
					Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
					Pembinaan Disiplin ASN
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		INSPEKTORAT DAERAH	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
					Reviu Laporan Keuangan
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah
					Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
					Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
					Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
					Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Milik Daerah
					Penatausahaan Barang Milik Daerah
					Inventarisasi Barang Milik Daerah
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
					Penagihan Pajak Daerah
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
					Pelaksanaan Konsultasi Publik
					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		SEKRETARIAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Kepala Daerah
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
				Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Fasilitasi Bantuan Hukum
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
					Penyusunan Tata Tertib DPRD
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
					Pembahasan APBD
					Pembahasan APBD Perubahan
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
					Penyusunan Program Kerja DPRD
					Publikasi dan Dokumentasi DPRD
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
					Pelaksanaan Reses
				Pelaksanaan dan Pengawasan	Pengawasan Kode Etik DPRD

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Kode Etik DPRD	
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
				Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
		KECAMATAN KENDAL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Jabatan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
					Evaluasi Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN PATEBON	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
		KECAMATAN PEGANDON	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		KECAMATAN WELERI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Pelayanan Publik	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		KECAMATAN GEMUH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Program Pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
		KECAMATAN CEPIRING	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		KECAMATAN KALIWUNGU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Desa	Pendayagunaan Aset Desa
		KECAMATAN BRANGSONG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		KECAMATAN BOJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Perangkat Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		KECAMATAN LIMBANGAN	Program Penunjang Urusan	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
		KECAMATAN SINGOROJO	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		KECAMATAN SUKOREJO	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daera	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Desa	Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		KECAMATAN PATEAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Mebel
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN PAGERUYUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
		KECAMATAN PLANTUNGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
					Koordinasi Pendampingan Desa di

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Wilayahnya
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
		KELURAHAN ROWOSARI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		KECAMATAN KANGKUNG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Urusan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Urusan Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		KECAMATAN RINGINARUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
		KECAMATAN NGAMPEL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
			Umum	dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
					Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Pembentukan Satgas Linmas Tingkat

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Kab/Kota
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
					Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembentukan Sekretariat PPNS
					Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
					Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
					Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
					Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
					Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
				Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
					Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
					Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penyelamatan dan	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Evakuasi Korban Bencana	Bencana Kabupaten/Kota
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
					Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota
			Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional,
					Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
					Penetapan Cagar Budaya
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
					Pengembangan Cagar Budaya
					Pemanfaatan Cagar Budaya
				Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Kabupaten/Kota	Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Permuesuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
					Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Nama OPD	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Program Pembinaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

4.4. Inovasi Sebagai Pembaharuan

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang salah satu sasaran pembangunan adalah meningkatkan kualitas jalan melalui kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan. Hal ini karena belum optimalnya pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan sehingga dengan adanya penerapan inovasi **Pengembangan Sistem Informasi Melalui Integrasi Database Perencanaan Bina Marga Kendal (BANG SIMAS TETAP ANDAL) untuk Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten** diharapkan data LHR, data kondisi jalan dan jembatan, Peta Fungsi jalan selalu terupdate sehingga mempermudah perolehan informasi data base perencanaan jalan maupun sebagai pertimbangan untuk penentuan garis sempadan. Pelaporan kerusakan jalan dapat juga dimanfaatkan sebagai updating data kondisi jalan, sehingga diperoleh kondisi jalan terkini yang bisa digunakan sebagai pertimbangan penanganan jalan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga ditekankan pada meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana dimulai dari skala yang paling kecil sampai besar, dari ketahanan bencana di perdesaan hingga di perkotaan sehingga perlu untuk mengoptimalkan desa tangguh bencana. Selain itu juga perlunya peningkatan *early warning system*, dan peningkatan prasarana penanganan bencana sebagai upaya pengoptimalan ketahanan bencana.

Dengan dukungan inovasi **EWS (*Early Warning System*)** yang merupakan alat pendeteksi dini tanah longsor dimana alat tersebut akan berbunyi ketika terjadi pergerakan tanah, alat ini juga akan memberikan sinyal suara sirine sehingga warga bisa segera meninggalkan tempat atau keluar rumah sehingga antisipasi jatuhnya bayak korban bisa diminimalisir.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal yang lain adalah peningkatan kualitas SDM. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan SDM terutama generasi muda sangat diperlukan untuk menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Untuk itu dibutuhkan inovasi yang tepat sehingga peningkatan kualitas SDM bisa tercapai. Salah satunya dengan inovasi **SPEK ANDAL (Strategi Peningkatan Kapasitas Melalui Perluasan Program Layanan Pendidikan Non Formal)** Pada 3 (tiga) Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Di Kabupaten Kendal. Peran PKBM sebagai pusat kegiatan pendidikan non formal di Kabupaten Kendal selama ini belum optimal. Pada

umumnya PKBM hanya berfokus pada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan saja. Padahal PKBM dapat menyelenggarakan berbagai program pendidikan non formal lainnya diantaranya: pendidikan kesetaraan (A, B dan C), pendidikan keaksaraan, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan life skill lainnya. Oleh karena itu, PKBM terutama bagi yang menyelenggarakan program paket C harus di dorong untuk melaksanakan perluasan program life skill sehingga lulusannya selain mendapatkan legalitas formal berupa ijazah juga mendapatkan tambahan bekal keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun bekal untuk berwirausaha.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas SDM, juga diperlukan peningkatan kualitas pendidik. Sejalan dengan hal tersebut, dilaksanakan inovasi **SIMAK GURU (Sistem Informasi Manajemen Kinerja Guru)** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
Simak Guru dalam rangka mendukung peningkatan mutu bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Disdikbud Kabupaten Kendal. Upaya ini untuk mentransformasikan pelayanan yang dulunya dilakukan secara manual, kemudian berinovasi menjadi digitalisasi. Dalam upaya peningkatan pelayanan yang bertransformasi menjadi digitalisasi akan memberikan kemudahan dan mempercepat proses penilaian kinerja guru. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini untuk evaluasi kinerja guru, peningkatan kualitas pendidikan, Identifikasi kebutuhan pelatihan, Pengambilan keputusan, akuntabilitas dan transparansi, pengawasan dan pemantauan. manfaat dari aplikasi SIMAK GURU adalah menyediakan ruang lingkup untuk mengelola data guru secara terpusat termasuk informasi pribadi, riwayat pendidikan, pengalama kerja, sertifikasi dan pelatihan yang diikuti. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja guru secara berkala, juga sebagai ajuan bagi Pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan kompetensi guru.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel merupakan salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Kendal. Dukungan SDM dan teknologi informasi mesti dimajukan bersama-sama dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, responsif dan adaptif. Inovasi **SI MATA ASN (Strategi Pengembangan Talenta dan Karir ASN di Kabupaten Kendal)** diharapkan mampu

menjawab tantangan tersebut. Penerapan manajemen talenta dan karier ASN perlu diprioritaskan, selain sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, juga untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leaders) serta sebagai salah satu kriteria sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa sistem manajemen talenta terhadap ASN merupakan program yang wajib untuk diimplementasikan secara komprehensif di semua instansi, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kendal. Manajemen talenta dan karier ASN harus dipandang sebagai sebuah implementasi strategi atau sistem yang terintegrasi, yang dirancang untuk meningkatkan kinerja melalui proses yang sistematis dengan melalui tahapan seleksi, pengembangan, dan pemanfaatan serta mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat (talenta) dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi saat ini dan masa datang. Untuk menjawab hal ini, maka perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2016 dengan peraturan perundang-undangan terkait melalui inovasi "SI MATA ASN" Strategi Pengembangan Talenta dan Karier ASN di Kabupaten Kendal.

Tujuan dari inovasi "SI MATA ASN" adalah terwujudnya pengembangan karier ASN dari talenta-talenta terbaik untuk rencana suksesi baik promosi maupun mutasi yang obyektif, terencana, terbuka, tepat waktu dan akuntabel serta merencanakan pengembangan kompetensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga tercipta ASN profesional yang memberikan pelayanan secara handal yang bermanfaat pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Kendal.

Melalui Manajemen Talenta ASN diperoleh manfaat antara lain bagi internal Pemerintah Kabupaten Kendal dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan profesional. Bagi Masyarakat secara langsung akan memberikan manfaat tersedianya ASN yang bekerja sesuai dengan kompetensinya sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat secara ekonomis dengan ada manajemen talenta akan berdampak pada efisiensi anggaran promosi mutasi pada BKPP Kabupaten Kendal.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal lainnya adalah mengembangkan sektor industri melalui peningkatan investasi, pengembangan wilayah industri, peningkatan industri padat karya dan regulasi yang mendukung pengembangan industri;

Hal ini diwujudkan dengan Pelayanan Publik berupa Pembangunan Sistem Informasi **"SI MITRA HARUM" (Digitalisasi Fasilitasi kemitraan Strategis Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah).**

Merupakan upaya transformasi digital pada kegiatan fasilitasi kemitraan berupa optimalisasi pengelolaan informasi peluang kemitraan strategis yang bisa diakses oleh berbagai pihak sebagai upaya transparansi dan memaksimalkan kegiatan fasilitasi kemitraan sebagai aktualisasi sinergitas ekosistem investasi di Kabupaten Kendal. Hasil dari inovasi ini berupa pembuatan digitalisasi informasi yang berisi tentang data kebutuhan kemitraan dari usaha besar dan data potensi UMKM yang siap bermitra dengan penyajian data secara WebGIS berbasis peta melalui penambahan fitur aplikasi yang akan terintegrasi dengan aplikasi yang ada yaitu aplikasi peta potensi. Aplikasi penyediaan data ini akan menyederhanakan alur proses pada SOP sebelumnya yang dinilai memiliki alur proses yang banyak dan panjang serta berulang sehingga kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Diharapkan sistem informasi ini dapat digunakan untuk menyediakan data kebutuhan kemitraan dari usaha besar dan data potensi UMKM yang siap bermitra secara akurat, jelas dan mudah diakses karena penyajiannya berbasis peta dengan mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi Peta Potensi yang sudah ada. Alur kerja kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pelayanan digital yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan strategis usaha besar dan usaha kecil menengah sehingga akan mendorong pada penandatanganan nota kesepakatan kemitraan sebagai target tujuan jangka Panjang. Oleh sebab itu pelayanan secara digital ini akan mampu mendorong pada peningkatan jumlah kemitraan usaha besar dan usaha kecil menengah dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM, juga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan. Untuk itu, dilaksanakan inovasi **SHOBAT SIMAH (Sistem Hantar Obat Pasien ke Rumah)** Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan di RSUD Dr.H. Soewondo Kabupaten Kendal.

Dilatarbelakangi belum optimalnya pelayanan farmasi rawat jalan berupa lamanya waktu tunggu pelayanan farmasi yang diharapkan mempunyai daya ungkit untuk mengurangi waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan yaitu penyediaan fasilitas pengantaran obat pasien ke rumah. Pelaksanaan Shobat Simah bekerjasama dengan JNE sebagai penyedia jasa layanan pengantaran obat. Dengan SHOBAT SIMAH, pasien tidak perlu menunggu untuk emndapaatkan obat di Farmasi, cukup mengambil nomor antrian, menginfokan kepada petugas farmasi bahwa akan menggunakan fasilitas Shobat Simah, mendapatkan edukasi, mengurus administrasi ke JNE, kemudian bisa pulang dan menunggu obat diantar ke rumah. Tarif pengantaran obat sebesar Rp. 9.000,- untuk seluruh area kabupaten Kendal. Dengan estimasi pengantaran obat H+0 s.d H+1. Untuk wilayah Kendal bagian bawah diterimakan pada H+0 dengan waktu pengantaran maksimal jam 21.00. Sedangkan untuk Kendal Bagian atas diterimakan H+1.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal lainnya adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja dan kawasan industri serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. **Kendal Karir** merupakan aplikasi bursa kerja yang dibangun khusus bagi warga Kabupaten Kendal yang dikelola oleh Disperinaker Kabupaten Kendal. Adapun fungsi layanan yang ada di Kendal Karir adalah untuk data lowongan kerja, data pencaker terdaftar, data kebutuhan kompetensi, data penempatan tenaga kerja, job matching, satu data IKM, dimana semua layanan dalam Kendal Karir sudah terintegrasi dengan Aplikasi Siap Kerja (portal layanan ketenagakerjaan Kemenaker) dan Informasi Lowongan Kerja E-Makaryo (Disnaker Provinsi Jateng) dan juga adanya integrasi data dengan SMK (kejuruan dan data penempatan). Dari sisi admin pengelola, untuk akun super admin ada di Disperinaker, akun admin Kab/Kota ada pada Disperinaker dan Perangda yang menyelenggarakan pelatihan, akun pemberi kerja, akun bursa kerja khusus, sehingga memungkinkan pemberi kerja untuk langsung membaca dan memilih kandidat dari pencari kerja yang terdaftar di Kendal Karir. Selain itu pemberi kerja juga bisa mencantumkan /mengisi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga apabila diperlukan digunakan sebagai sumber data "Training Need Analisi/TNA".

Dalam rangka mewujudkan meningkatkan kapasitas, potensi, dan kemandirian pemuda melalui pengembangan kewirausahaan yang terstruktur, berkelanjutan, serta berbasis pada potensi lokal di setiap wilayah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan yaitu peningkatan kualitas SDM, maka dibutuhkan program strategis yang terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian dan daya saing pemuda yaitu inovasi **SEMANIS KAMU (Sekolah Mahir Bisnis, Kewirausahaan Pemuda)**. Inovasi SEMANIS KAMU berangkat dari permasalahan tingginya tingkat pengangguran pemuda, kurangnya pendidikan dan literasi kewirausahaan, keterbatasan ruang ekspresi dan inkubasi bisnis bagi pemuda, kurangnya apresiasi dan insentif untuk wirausaha muda, sehingga memiliki keunggulan dalam siklikal yang berkelanjutan, dimana Semanis Kamu menggabungkan pelatihan, pendampingan, tantangan, dan reward secara terpadu. Inovasi ini mengedepankan *learning by doing* melalui simulasi usaha nyata, serta kompetisi yang mendorong kreativitas dan mental juang pemuda. Kolaborasi lintas sektor memperkuat ekosistem kewirausahaan dari hulu ke hilir. Sistem insentif dan pemantauan berkala memastikan dampak yang terukur dan berkelanjutan. Program ini bersifat fleksibel, replikatif, serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), menjadikannya inovasi strategis dalam pemberdayaan ekonomi pemuda daerah.

Tahapan SEMANIS KAMU dirancang dalam siklus berulang untuk memastikan pembelajaran yang berkelanjutan. Dimulai dari tahap **seleksi dan penilaian potensi awal**, peserta yang lolos kemudian mengikuti **Pelatihan Kewirausahaan** yang mencakup mindset, perencanaan bisnis, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, peserta memasuki tahap **pendampingan intensif** bersama mentor dan praktisi, sekaligus menjalankan **simulasi usaha nyata**. Setelah itu, peserta mengikuti **kompetisi bisnis** seperti Bee Comp (*Business Idea Competition*) untuk menguji ide dan eksekusi usaha. Pada tahap akhir, peserta terbaik menerima **reward** berupa modal usaha, kemitraan, dan sertifikat penghargaan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur perkembangan dan keberlanjutan usaha peserta. Seluruh tahapan ini kemudian dapat diulang dalam siklus baru dengan materi dan tantangan yang lebih tinggi, menjadikan program ini adaptif, berkembang, dan relevan dengan dinamika wirausaha muda.

Output yang dihasilkan diantaranya terselenggaranya pelatihan dan pendampingan wirausaha muda kepada minimal 100 pemuda per tahun, terbentuknya 50 rintisan usaha pemuda baru yang layak, *survive*, dan berkelanjutan, meningkatnya akses pemuda terhadap jejaring kemitraan strategis, baik dengan sektor swasta, BUMD, maupun pelaku industri kreatif.

Inovasi **GITAR MELODI** (Akselerasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Sinergitas Pentahelix Untuk Rujukan Kampanye, Konseling dan Edukasi) mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal yaitu peningkatan kualitas SDM. Inovasi yang lahir sebagai bentuk keprihatinan atas tingginya angka pernikahan dini yang cukup tinggi, terutama pada perempuan dari keluarga rentan, minimnya edukasi seksualitas dan kesehatan reproduksi, keterbatasan akses terhadap konseling dan layanan pendampingan terhadap kelompok rentan.

GITAR MELODI sebagai inovasi lintas sektor dengan pendekatan Pentahelix yang melibatkan (Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media) dalam tahapan kegiatannya dimana masing-masing stakeholder memiliki peran masing-masing untuk meningkatkan literasi publik, memberikan layanan rujukan, konseling, dan edukasi berbasis komunitas, mendorong peran perempuan sebagai agen perubahan.

Keunggulan dari inovasi Gitar Melodi terletak pada :

a. Sinergi Pentahelix : menyatukan seluruh stakeholder dengan koordinasi intensif.
b. Digitalisasi dan Kampanye Terpadu : penggunaan media sosial, radio komunitas, dan platform daring.
c. Pemberdayaan Perempuan : melibatkan perempuan sebagai mentor, fasilitator, dan pelaku usaha.
d. Desa Berlian : pemberian insentif dan penghargaan bagi desa yang bebas praktik pernikahan dini.
e. Layanan Terintegrasi : konseling, rujukan, edukasi parenting, dan pelatihan kewirausahaan di satu tempat.

Output dari Gitar melodi ini mencakup tersedianya data lokus dan keluarga rentan pernikahan dini, terlaksananya kampanye *parenting* dan pencegahan pernikahan dini bagi perempuan dan keluarga rentan, terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan, dan tersedianya layanan rujukan, konseling, dan edukasi pencegahan pernikahan dini melalui Graha

Sinergitas Pentahelix untuk Rujukan, Kampanye, Konseling, dan Edukasi (Graha Gitar Melodi).

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja Kabupaten Kendal Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 serta disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Berdasarkan arahan prioritas dan target maka program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut: program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh akan dikelompokkan menjadi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam pelaksanaan pembangunan 2026, program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan struktur belanja mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menganut SIPD dari Kementerian Dalam Negeri.

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

Rencana pendanaan daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Kerangka Pendanaan Kabupaten Kendal Tahun 2026

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2026
PENDAPATAN	**2.620.362.836.864**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**706.239.693.373**
Hasil Pajak Daerah	417.493.922.628
Hasil Retribusi Daerah	260.507.220.745
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.010.550.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.228.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	**1.914.123.143.491**
Transfer Pemerintah Pusat	**1.781.257.506.930**
Dana perimbangan	1.503.638.526.930
Dana Transfer Umum	1.062.938.558.930
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.988.219.100
Dana Alokasi Umum	1.011.950.339.830

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2026
Dana Transfer Khusus	440.699.968.000
Dana Alokasi Khusus Fisik	40.147.526.000
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	400.552.442.000
Dana Desa	262.618.980.000
Dana Insentif Fiskal	15.000.000.000
Transfer Antar-Daerah	**132.865.636.561**
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	118.865.636.561
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.000.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**-**
Hibah dari Pemerintah	-
BELANJA DAERAH	2.670.362.836.864
BELANJA OPERASI	**2.013.218.000.070**
Belanja Pegawai	1.277.275.349.171
Belanja Barang dan Jasa	623.722.348.903
Belanja Hibah	110.000.302.000
Belanja Bantuan Sosial	2.220.000.000
BELANJA MODAL	**233.798.596.985**
Belanja Modal	233.798.596.985
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.000.000.000**
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER	**418.346.239.805**
Belanja Bagi Hasil	47.679.134.428
Belanja Bantuan Keuangan	370.667.105.377
JUMLAH	**2.670.362.836.864**
SURPLUS / (DEFISIT)	**(50.000.000.000)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**50.000.000.000**
Penerimaan Pembiayaan	**50.000.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	50.000.000.000
Pencairan dana cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
Penerimaan pinjaman daerah	**-**
Pengeluaran Pembiayaan	**-**
Pembentukan Dana Cadangan Daerah	-
Penyertaan Modal Daerah	-
Pembiayaan Netto	***50.000.000.000***
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

5.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.2.1 Pendidikan.

Urusan Pendidikan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, mendorong wajib belajar 13 tahun, perluasan akses terhadap perguruan tinggi, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal tersebut dapat

terwujud dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan diantaranya melalui penyelenggaraan beasiswa untuk penduduk miskin dan berprestasi, pelayanan pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD hingga SMP, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang merata, optimalisasi pengelolaan dan pelayanan dana BOS dan BOP untuk operasional kegiatan di satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan kesetaraan. Program kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan juga difokuskan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, mendukung prioritas daerah yaitu Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur pembangunan serta mendukung prioritas nasional di bidang pendidikan.

Pada urusan Pendidikan, indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja tahun 2026, yaitu:

- Harapan lama sekolah sebesar 13,75 tahun;
- Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,1 tahun;
- Literasi dengan Nilai 71,00;
  a. Literasi Membaca SD/Sederajat sebesar 64,61
  b. Literasi Membaca SMP/Sederajat sebesar 77,36
- Numerasi dengan Nilai 63,10;
  a. Numerasi Membaca SD/Sederajat sebesar 58,92
  b. Numerasi Membaca SMP/Sederajat sebesar 67,21
- Angka Partisipasi Sekolah sebesar 100 %;
- Angka Partisipasi Kasar sebesar 100 %; dan
- Angka Partisipasi Murni sebesar 91,38 %.

Dalam mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

   Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan rata–rata lama sekolah, peningkatan harapan lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta memenuhi SPM Bidang Pendidikan. Koordinasi terkait dengan perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan dilaksanakan melalui evaluasi pemutakhiran data pokok pendidikan dan pendataan anak usia 5-6 tahun yang tidak sekolah. Terdapat juga pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi melalui sosialisasi–sosialisasi kepada para siswa. Pada program ini direncanakan untuk peningkatan kualitas gedung dan sarana prasarana pendidikan, diantaranya pengadaan/rehabilitasi ruang kelas, pengadaan *smartboard*, meubelair, sarana prasarana gedung dan utilitasnya, alat peraga pendidikan,

peningkatan kualitas laboratorium dan pemberian perlengkapan peserta didik untuk siswa SD dan SMP.

Program ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Dalam pelaksanaannya, Program Pengelolaan Pendidikan diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan, diantaranya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pengadaan Mebel Sekolah, Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikam, Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, dan Koordinasi, Perencanaan Supervisi, Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyediaan Infrastruktur TIK, Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik, dan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.
2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan sub kegiatan, diantaranya Pembangunan laboratorium, Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, Rehabilitasi sedang/berat laboratorium, Rrehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Penyediaan biaya personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan, Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi, Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik, Pembangunan ruang kelas baru, serta Pengadaan perlengkapan peserta didik.

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sub kegiatan, diantaranya Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pengelolaan Dana BOP PAUD, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD, Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan, Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Pembangunan ruang kelas baru, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD, serta Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan, dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, Pengadaan perlengkapan peserta didik, Pembangunan ruang kelas baru, Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik, serta Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendistribusian guru. Pada program ini juga dilaksanakan identifikasi dan penyediaan serta pemerataan guru. Pemberian hibah Madin/pendidikan keagamaan dan insentif untuk guru non

ASN merupakan salah satu prioritas untuk peningkatan kesejahteraan guru yagn dilaksanakan melalui program ini. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kapasitas guru dan pengembangan karir guru.

Program ini juga mendukung prioritas nasional yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, termasuk didalamnya Beasiswa Guru Berprestasi untuk studi lanjut. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan sub kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

c. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Program ini diwujudkan melalui kegaitan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melalui sub kegiatan Penyusunan kompetensi dasar/capaian pembelajaran muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui sub kegiatan Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

5.2.2 Kesehatan.

Pada tahun 2026, urusan kesehatan akan difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan, peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan

peningkatan akses masyarakat ke pelayanan Kesehatan, salah satunya melalui program Rumah Sakit Berjalan. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan penyediaan kebutuhan farmasi juga menjadi salah satu hal yang prioritas pada urusan ini. Selain itu, peningkatan keselamatan ibu dan anak, peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan menuju UHC (*Universal Health Coverage*) dan perilaku hidup bersih dan sehat. Program kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan juga difokuskan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, mendukung prioritas daerah yaitu Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur Pembangunan, serta mendukung prioritas nasional di bidang kesehatan.

Pada urusan kesehatan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja, yaitu :

- Usia harapan hidup sebesar 75,19 tahun;
- Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 82,59 / 100.000 kelahiran hidup;
- Angka Kematian Balita sebesar 11,8/1.000 kelahiran hidup;
- Angka populasi bebas penyakit tidak menular 86,67 %;
- Angka populasi bebas penyakit menular 63,33 %;
- Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai Standar sebesar 84%; dan
- Prevalensi stunting sebesar 17,95%.

Dalam mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maupun peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Peningkatan *Universal Health Coverage* (UHC) menjadi 98% juga dilaksanakan melalui program ini, yaitu dengan menambahkan pemberian subsidi BPJS kepada masyarakat, disamping iuran BPJS untuk masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2026 nanti juga masih berfokus pada penurunan stunting, salah satunya melalui program Germas Tania (Gerakan Remaja Sehat Tanpa Anemia), sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya stunting dan penyakit lain, selain dilakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita dan program–program lainnya. Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan program ini juga bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, penurunan Angka Kematian Ibu dan penurunan Angka kematian Bayi dan Balita, salah satunya melalui Posyandu ibu hamil, bayi dan balita, serta untuk peningkatan tata

kelola manajemen dan operasional RSUD dan Puskesmas. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan pembelian alat Kesehatan, pembelian obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin dan pemenuhan kebutuhan faskes lainnya termasuk dukungan untuk program Rumah Sakit Berjalan dilaksanakan melalui program ini.

Program ini juga dilaksanakan untuk mendukung penurunan angka penderita hipertensi, diabetus melitus, penderita TBC dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pada program ini juga direncanakan untuk pengadaan Ambulance, rehabilitasi Puskesmas yang direncanakan untuk Rehabilitasi Gedung TB dan Pagar di Puskesmas Brangsong II, serta lanjutan pembangunan *Diagnostic Centre* pada RSUD dr. H. Soewondo beserta pengadaan alat pendukungnya maupun pendukung pelayanan Kesehatan lainnya.

Selain itu, program ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Dalam upayanya untuk memenuhi dan meningkatkan kesehatan perorangan dan masyarakat, program ini diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pembangunan Puskesmas, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, dan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pengelolaan pelayanan kesehatan balita, Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pengelolaan pelayanan kesehatan

penderita diabetes melitus, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampat krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya, Pengelolaan Surveillans Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Pengelolaan upaya pengurangan krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan, Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Operasional pelayanan Puskesmas, Operasional pelayanan fasilitas keseharan lainnya, Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal), Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria, serta Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang kesehatan Kabupaten/Kota.

3) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.
4) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini dilaksanakan untuk mendukung penyediaan obat, farmasi dan alat–alat kesehatan. Penyediaan obat-obatan pada Puskesmas dan jaringannya atau Puskesmas Pembantu, dilaksanakan dengan menggunakan program ini. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perijinan P-IRT dan BPOM untuk pelaku industri rumah tangga. Hal ini sangat membantu dalam proses *branding* industri rumah tangga, sehingga produknya sudah terjamin aman. Program ini diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
2) Kegiaitan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
3) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga melalui sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan – Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dokter dan perawat melalui keikutsertaan pada *workshop*, bintek maupun pendidikan dan pelatihan. Program ini juga dilaksanakan untuk mendukung kebijakan prioritas nasional, yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, dengan pemenuhan 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan dua orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi, Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima, 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di RSUD sesuai Permenkes Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology), serta tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar, dan Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan prioritas nasional yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyaraakat,
2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat,
3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan untuk pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan rutin perkantoran, dan untuk layanan operasional BLUD pada Puskesmas dan RSUD, baik operasional pelayanan maupun pengadaan alat-alat kesehatan.

5.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada tahun 2026, Rencana Program dan Kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan. Peningkatan kualitas infrastruktur meliputi penguatan kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan. Selain itu juga mendukung peningkatan konektivitas infrastruktur pusat pertumbuhan ekonomi termasuk pariwisata, dan akses layanan dasar serta infrastruktur ketahanan bencana. Selain itu, pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berfokus pada peningkatan akses air minum, akses limbah domestik, peningkatan pelayanan air minum dan air limbah sesuai SPM.

Sesuai dengan arah kebjakan “Kendal Hebat”, salah satu prioritas daerahnya Pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara komprehensif, merata dan memadai, fokus pembangunan adalah pada peningkatan kualitas jalan, terutama pada peningkatan kelas jalan, pemeliharaan jalan. Selain itu, pada tahun 2026 ini pembangunan infrastruktur juga masih melanjutkan fokus tahun sebelumnya yaitu peningkatan kualitas drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi, peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitas irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah.

Program kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga difokuskan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum dan penataan ruang, mendukung prioritas daerah yaitu Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur Pembangunan, serta mendukung prioritas nasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Presentase infrastruktur wilayah yang terbangun sebesar 72,50%;
- Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum sebesar 76,79 %;
- Persentase jalan kondisi mantap sebesar 84,4%;
- Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW sebesar 82,33%;
- Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 39,94 %;
- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebesar 1,10; dan
- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak sebesar 95,78%.

Dalam mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Penyelenggaraan Jalan

   Program ini dilaksanakan untuk melaksanakan pembangunan jalan menuju pusat perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, destinasi wisata, serta penanganan jalan dan jembatan di daerah perbatasan dan terpencil. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan target 53,85 % pada tahun 2026.

Program Penyelenggaraan Jalan diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Rekonstruksi jalan, Pemeliharaan berkala jalan, Penggantian jembatan, Pemeliharaan rutin jembatan, Pemeliharaan berkala jembatan, Rehabilitasi Jembatan, Survey kondisi jalan/jembatan, Rehabilitasi jalan, dan Pemeliharaan rutin jalan.

Pemeliharaan jalan dilaksanakan melalui rekonstruksi jalan maupun rehabilitasi jalan. Ruas jalan yang akan direncanakan untuk dilakukan rekonstruksi maupun pemeliharaan, yaitu:

- Rekonstruksi Jalan Cepiring – Pidodokulon
- Rekonstruksi Jalan Bringinsari - Gentinggunung
- Rekonstruksi Jalan Bringinsari - Jambean
- Rekonstruksi Jalan Bringinsari - Purwosari
- Rekonstruksi Jalan Bulak - Sendangsikucing
- Rekonstruksi Jalan Cangkring - Jaro
- Rekonstruksi Jalan Damarjati - Peron
- Rekonstruksi Jalan Dempelrejo – Jatirejo
- Rekonstruksi Jalan Kaliputih - Muncar
- Rekonstruksi Jalan Kalisuren - Pakeman
- Rekonstruksi Jalan Karangmanggis - Ngabean
- Rekonstruksi Jalan Kebonharjo - Wonosari
- Rekonstruksi Jalan Kedungboto - Jengkol (Batas Kab. Temanggung)
- Rekonstruksi Jalan Kendal - Bandengan (Jl. Laut)
- Rekonstruksi Jalan Kertosari - Trisobo
- Rekonstruksi Jalan Ketapang - Sukodono
- Rekonstruksi Jalan Laban - Jungsemi
- Rekonstruksi Jalan Langenharjo - Sijeruk
- Rekonstruksi Jalan Lengkong - Wonorejo
- Rekonstruksi Jalan Limbangan - Getas
- Rekonstruksi Jalan Magelung - Sumur
- Rehabilitasi Jalan Boja - Darupono
- Rehabilitasi Jalan Bahari
- Rehabilitasi Jalan Banyutowo - Turunrejo
- Rehabilitasi Jalan Bugangin - Purwokerto
- Rehabilitasi Jalan Candiroto - Sudipayung
- Rehabilitasi Jalan Cangkring - Tosari
- Rehabilitasi Jalan Cepiring - Gemuh
- Rehabilitasi Jalan Cepiring - Juwiring
- Rehabilitasi Jalan Curugsewu - Kalices
- Rehabilitasi Jalan Darupono - Kedungsuren
- Rehabilitasi Jalan Donomerto - Gentinggunung - Kediten
- Rehabilitasi Jalan Gemuh - Sedayu
- Rehabilitasi Jalan Gondang - Botomulyo
- Rehabilitasi Jalan Jaro – Pening
- Rehabilitasi Jalan Jatinem - Kediten
- Rehabilitasi Jalan Jetis - Bojonggede
- Rehabilitasi Jalan Jurangagung - Wadas
- Rehabilitasi Jalan Sidodadi - Manggung
- Rehabilitasi Jalan Biting - Cening
- Rehabilitasi Jalan Banyuringin - Sukodadi
- Rehabilitasi Jalan Pageruyung – Sidomukti

- Rekonstruksi Jalan Margosari - Sriwulan
- Rekonstruksi Jalan Mlatiharjo - Ngargosari
- Rekonstruksi Jalan Ngerjo - Jatigowok
- Rekonstruksi Jalan Nglarik - Krajankulon
- Rekonstruksi Jalan Pagersari - Wirosari
- Rekonstruksi Jalan Penjalin - Tunggulsari
- Rekonstruksi Jalan Pidodokulon - Jomblom
- Rekonstruksi Jalan Puguh - Pekuncen
- Rekonstruksi Jalan Rejosari - Turunrejo
- Rekonstruksi Jalan Rowosari - Tawanglaut (Batas Kab. Batang)
- Rekonstruksi Jalan Selokaton - Tamanrejo
- Rekonstruksi Jalan Sendangsikucing - Larangan
- Rekonstruksi Jalan Sidomakmur - Ngareanak
- Rekonstruksi Jalan Sojomerto - Cipluk - Kalisuren
- Rekonstruksi Jalan Sojomerto - Kalibareng
- Rekonstruksi Jalan Sukodono - Bulugede
- Rekonstruksi Jalan Sukomangli - Kalilumpang
- Rekonstruksi Jalan Tambahsari - Biting
- Rekonstruksi Jalan Tegorejo - Puguh
- Rekonstruksi Jalan Wonosari - Kartikajaya
- Rekonstruksi Jalan Sudipayung - Ngampelkulon
- Rekonstruksi Jalan Pegandon - Jatirejo
- Rekonstruksi Jalan Cepiring - Kalirandugede
- Rekonstruksi Jalan Wonotenggang - Rowosari
- Rekonstruksi Jalan kendal – Bandengan (Jl. Laut)
- Rekonstruksi Jalan Boja - Darupono
- Rekonstruksi Jalan Banyuringin - Kaliputih
- Rekonstruksi Jalan Sudipayung - Ngampelkulon
- Rekonstruksi Jalan Jetis - Bojonggede
- Rehabilitasi Jalan Kalibuntu - Sijeruk
- Rehabilitasi Jalan Kalipuru - Curugsewu
- Rehabilitasi Jalan Kaliwungu - Darupono
- Rehabilitasi Jalan Karangayu - Kalirejo
- Rehabilitasi Jalan Karangdowo - Penaruban
- Rehabilitasi Jalan Karangmanggis - Ngabean
- Rehabilitasi Jalan Kebumen - Tamanrejo
- Rehabilitasi Jalan Kedungsari - Getas
- Rehabilitasi Jalan Kendal - Ketapang
- Rehabilitasi Jalan Kertomulyo - Penjalin
- Rehabilitasi Jalan Kertosari - Goakiskendo
- Rehabilitasi Jalan Kertosari - Trisobo
- Rehabilitasi Jalan Kliris - Leban
- Rehabilitasi Jalan Krikil - Petung
- Rehabilitasi Jalan Laban - Karangmalang
- Rehabilitasi Jalan Lebosari - Tanjungmojo
- Rehabilitasi Jalan Limbangan - Beku
- Rehabilitasi Jalan Limbangan - Sriwulan
- Rehabilitasi Jalan Lingkar Barat Sukorejo
- Rehabilitasi Jalan Lingkar Selatan Sukorejo
- Rehabilitasi Jalan Meteseh - Trisobo
- Rehabilitasi Jalan Mlatiharjo - Ngargosari
- Rehabilitasi Jalan Ngareanak - Banyuringin
- Rehabilitasi Jalan Ngasinan - Ringinarum
- Rehabilitasi Jalan Pagerdawung - Poncorejo
- Rehabilitasi Jalan Pageruyung - Gondoharum
- Rehabilitasi Jalan Pageruyung - Selokaton
- Rehabilitasi Jalan Pegandon - Jatirejo
- Rehabilitasi Jalan Penyangkringan - PLN

- Rekonstruksi Jalan Salakan - Sambongsari
- Rekonstruksi Jalan Jaro - Pening
- Rekonstruksi Jalan Kendal - Ketapang
- Rekonstruksi Jalan Griya Praja Mukti
- Rekonstruksi Jalan Langenharjo – Karangsari
- Rekonstruksi Jalan Nolokerto - Protomulyo
- Rekonstruksi Jalan Kendal - TPI Bandengan
- Rekonstruksi Jalan Darupono – Kedungsuren
- Rekonstruksi Jalan Gebang – Pamriyan
- Rekonstruksi Jalan Goakiskendo – Kalirejo
- Rekonstruksi Jalan Jalur Lambat Barat Kendal
- Rekonstruksi Jalan Kertosari – Goakiskendo
- Rekonstruksi Jalan Krikil – Petung
- Rekonstruksi Jalan Lingkar Utara Sukorejo
- Rekonstruksi Jalan Pagersari - Curugsewu
- Rekonstruksi Jalan Banyutowo - Turunrejo
- Rehabilitasi Jalan Wadas - Bendosari
- Rehabilitasi Jalan Wonotenggang - Rowosari
- Rehabilitasi Jalan Montongsari - Tratemulyo
- Rehabilitasi Jalan Kedungsuren - Sidomakmur
- Rehabilitasi Jalan Pasigitan - Gonoharjo
- Rehabilitasi Jalan Meteseh - Tambangan
- Rehabilitasi Jalan Penaruban – Penyangkringan
- Rehabilitasi Jalan Bebengan – Meteseh
- Rehabilitasi Jalan Bunderan Sukorejo - Terminal Sukorejo
- Rehabilitasi Jalan Kendal - Bandengan (Jl. Laut)
- Rehabilitasi Jalan Lanji – Bulugede
- Rehabilitasi Jalan Putat – Pegandon
- Rehabilitasi Jalan Rowosari - Tawanglaut (Batas Kab. Batang)
- Rehabilitasi Jalan Sarirejo – Lengkong
- Rehabilitasi Jalan Peron - Pakis
- Rehabilitasi Jalan Pojoksari - Kaliyoso
- Rehabilitasi Jalan Puguh - Jatirejo
- Rehabilitasi Jalan Puguh - Pasigitan
- Rehabilitasi Jalan Puguh - Pekuncen
- Rehabilitasi Jalan Rowosari - Gempolsewu
- Rehabilitasi Jalan Salakan – Sambongsari
- Rehabilitasi Jalan Tunggulrejo – Jotang
- Rehabilitasi Jalan Gemuh
- Rehabilitasi Jalan Tlahab – Laban
- Rehabilitasi Jalan Tampingan – Margosari
- Rehabilitasi Jalan Boja – Kaligading
- Rehabilitasi Jalan Lingkar Selatan Boja
- Rehabilitasi Jalan Tamanrejo – Bringinsari
- Rehabilitasi Jalan Kadilangu – Kaliyoso
- Rehabilitasi Jalan Sumur - Penjalin
- Rehabilitasi Jalan Sendangdawuhan - Kebonsari
- Rehabilitasi Jalan Sinom - Rowosari
- Rehabilitasi Jalan Sudipayung - Ngampelkulon
- Rehabilitasi Jalan Sukomangli - Kalilumpang
- Rehabilitasi Jalan Sumberagung - Manggungsari
- Rehabilitasi Jalan Sumberagung – Penyangkringan
- Rehabilitasi Jalan Gempolsewu – Tawang
- Rehabilitasi Jalan Getas – Kaliputih
- Rehabilitasi Jalan Gonoharjo – Nglimut
- Rehabilitasi Jalan Kaliwungu – Mororejo
- Rehabilitasi Jalan Kaliwungu – Plantaran
- Rehabilitasi Jalan Lingkar Pariwisata Curugsewu
- Rehabilitasi Jalan Lingkar Utara Boja

- Rehabilitasi Jalan Sawahalas – Gentansari
- Rehabilitasi Jalan Sawahjati
- Rehabilitasi Jalan Sebatang – Kebondalem
- Rehabilitasi Jalan Tegorejo - Ngampelkulon
- Rehabilitasi Jalan Plantaran – Sidorejo
- Rehabilitasi Jalan Sendangkulon – Pening
- Rehabilitasi Jalan Tanjungmojo – Kalirejo

Pemeliharaan jalan dilaksanakan dengan menggunakan metode baru yang diharapkan lebih kuat dan awet sehingga dapat meningkatkan panjang jalan mantap di Kabupaten Kendal.

Selain pemeliharaan jalan, pada program ini juga dilaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jembatan, dengan lokasi yang direncanakan sebagai berikut:

- Penggantian Jembatan Jalan Kalices - Sojomerto
- Penggantian Jembatan Jalan Kliris - Leban
- Penggantian Jembatan Jalan Tegorejo - Puguh
- Penggantian Jembatan Jalan Goakiskendo - Kalirejo
- Penggantian Jembatan Jalan Sojomerto - Cipluk - Kalisuren
- Penggantian Jembatan Jalan Ngareanak - Banyuringin
- Penggantian Jembatan Jalan Wonosari - Kartikajaya
- Penggantian Jembatan Jalan Wonotenggang - Rowosari
- Penggantian Jembatan Jalan Pojoksari - Kaliyoso
- Penggantian Jembatan Jalan Rejosari - Turunrejo
- Penggantian Jembatan Jalan Pegandon - Jatirejo
- Penggantian Jembatan Kendal – TPI Bandengan
- Penggantian Jembatan Jalan Bringinsari – Jambean
- Penggantian Jembatan Purwokerto - Wonorejo
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Kalices - Sojomerto
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Wonosari - Kartikajaya
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Kebonadem - Kumpulrejo
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Lingkar Bebengan
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Rejosari - Turunrejo
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Cepiring - Juwiring
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Kedungsuren - Jerukgiling
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Sendangkulon - Pening
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Tlahab - Laban
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Limbangan - Beku
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Pucakwangi - Gondoharum
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Pagersari - Wirosari
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Jambearum - Wonosari
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Plantungan - Blumah
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Sendangdawuhan - Kebonsari
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Tambaksari - Tanjunganom
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Wonotenggang - Rowosari
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Lingkar Selatan Sukorejo
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Ngerjo - Jatigowok
- Rehabilitasi Jembatan Jalan Sukodono - Bulugede

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencegahan bencana banjir, yang meliputi pembangunan infrastruktur pencegah banjir, maupun pemeliharaan sungai untuk mengurangi endapan yang dapat mengakibatkan

banjir. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator Persentase irigasi kewenangan kab dalam kondisi baik dengan target sebesar 50,2%. Program Pengelolaan Sumber Daya Air diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir, Operasi dan pemeliharaan sungai, Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai, Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota, Normalisasi/restorasi sungai, dan Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai.
2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Rehabilitasi bendung irigasi, Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, dan Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa.

   Pada tahun 2026, rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung irigasi direncanakan dilaksanakan pada:

   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dapu (DI Blimbing) Desa Boja Kec. Boja
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Aji Gede Desa Gondang Kecamatan Limbangan
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bang Kiri Desa Trimulyo Kec. Sukorejo
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Blimbing Desa Boja Kec. Boja
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bulupitu Desa Surokonto Wetan Kec. Pageruyung
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cinandi Desa Kalibareng Kec. Patean
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Glagah Desa Kalibareng Kec. Patean
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gogor Desa Kliris Kec. Boja
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jurangmangu Desa Jurangagung Kec. Plantungan
   - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Keseser Desa Pakisan Kec. Patean
   - Rehabiltasi Bendung Irigasi DI Logung Desa Sidodadi Kec. Patean
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Anyar Desa Gondang Kec. Limbangan
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Betro Desa Sidodadi Kec. Patean
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Dadap Desa Tirtomulyo Kec. Sukorejo
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Jamban Desa Plososari Kec. Patean
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Kleon Bangunsari Kec. Pageruyung
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Sambikerto Desa Kalipakis Kec. Sukorejo
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Sepat Desa Jurangagung Kec. Plantungan
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi D I Siwuluh Desa Wadas Kec. Plantungan
   - Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Aji Desa Gedong Kec. Patean

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Klurahan Desa Salamsari Kec. Boja
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kramat Desa Selokaton Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kranggan Desa Bangunsari Kec. Pageruyung
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lingseng Desa Kalibogor Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mendahane Desa Mulyosari Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pacar Desa Trimulyo Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Perto Desa Kalibareng Kec. Patean
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pilang Desa Boja Kec. Boja
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pinggir Desa Bangunsari Kec. Pageruyung
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Plalar Desa Petung Kec. Pageruyung
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rambut Gono Desa Plososari Kec. Patean
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sekauman Desa Purwogondo Kecamatan Boja
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sepat Desa Jurangagung Kec. Plantungan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Serongkek Desa Margosari Kec. Limbangan
- Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Suroloyo Desa Plososari Kec. Patean
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Trenggo Desa Tlogopayung Kec. Plantungan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi M.A Nam Nam Desa Banjarejo Kecamatan Boja
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Aji I Desa Kalibogor Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Aji Leban Desa Leban Kec. Boja
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Aji Wonogiri Desa Wirosari Kec. Patean
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Bangkong Desa Kalibogor Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Besaran Desa Pakisan Kec. Patean
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Dawuhan Desa Pucakwangi Kec. Pageruyung
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Geni Desa Gedong Kecamatan Patean
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Guntur Desa Singorojo Kec. Banyuringin
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Jajar Desa Kalices Kecamatan Patean
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Jamban/Medono Desa Petung Kecamatan Pageruyung
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Lekor Desa Gondoharum Kec. Pageruyung
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Pinggir Desa Bangunsari Kec. Pageruyung
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Rowocawet Desa Plososari Kec. Patean
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Sembojjo Desa Mlatiharjo Kec. Patean
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Sempu Desa Tampingwinarno Kec. Sukorejo
- Rehabilitasi Bendung Irigasi DI Sengon Jurang Desa Plososari Kec. Patean

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan air minum layak untuk masyarakat. Diharapkan dengan semakin banyaknya rumah tangga yang dilayani air minum, maka capaian *Universal Access* dapat meningkat.

Keberhasilan program ini diukur melalui capaian target Persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota sebesar 95.78 %.

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diwujudkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan, dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan.

Pada tahun 2026, peningkatan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan direncanakan pada:

- Peningkatan SPAM Desa Pekuncen Kec. Pegandon
- Peningkatan SPAM Desa Sidodadi Kec. Patean
- Peningkatan SPAM Desa Mulyosari Kec. Sukorejo
- Peningkatan SPAM Desa Sidokumpul Kec. Patean
- Peningkatan SPAM Desa Limbangan Kec. Limbangan
- Peningkatan SPAM Desa Peron Kec. Limbangan
- Perluasan SPAM Desa Tamanrejo Kec. Sukorejo
- Perluasan SPAM Desa Peron Kec. Limbangan
- Perluasan SPAM Desa Cening Kec. Singorojo
- Perluasan SPAM Desa Mojo Kec. Ringinarum
- Perluasan SPAM Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo
- Peningkatan SPAM Desa Tamanrejo Kec. Limbangan

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pemeliharaan maupun pembangunan drainase di Kabupaten Kendal. Dengan terbangunnya drainase, genangan air dapat diminimalisir sekaligus menjaga kondisi jalan agar tidak mudah rusak karena genangan air. Keberhasilan program ini diukur melalui Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik dengan target tahun 2026 sebesar 41,02%. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, dan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

Pada program ini akan dilaksanakan peningkatan saluran drainase dan pembangunan drainase perkotaan yang direncanakan pada :

- Peningkatan Saluran Ruas Jl. Lingkar Utara Boja
- Peningkatan Saluran Ruas Jl. Lingkar Selatan Boja
- Pembangunan Drainase Perkotaan Ruas Jalan Pahlawan II Kendal
- Pembangunan Drainase Perkotaan Ruas Jl. Sukorejo - Kalipuru

- Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jl. Boja - Kaligading Kec. Boja
- Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jl. Gemuh - Sedayu
- Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jl. Laut Kec. Kendal
- Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jl. Kendal - Sijeruk Kec. Kendal
- Peningkatan Saluran Drainase Sebatang - Kebondalem
- Peningkatan Drainase Lingkungan RTH Weleri
- Pembangunan Drainase Perkotaan Ruas Jalan Griya Praja Mukti Kendal
- Pembangunan Drainase Jalan Kendal – TPI Bandengan
- Peningkatan Drainase Perkotaan Ruas Jalan Karangari - Bandengan
- Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jl. Lingkar Utara Sukorejo
- Peningkatan Saluran Drainase Ruas Jl. Ngasinan - Ringinarum

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini juga dilaksanakan untuk mendukung peningkatan *Universal Access* melalui peningkatan akses air limbah domestik yang mendukung peningkatan sanitasi layak. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman dengan target tahun 2026 sebesar 92,11%. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman, Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Pembangunan dan penyediaa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik direncanakan pada lokasi berikut:

- IPAL Komunal Desa Gedong Kec. Patean
- IPAL Komunal Desa Trimulyo Kec. Sukorejo
- IPAL Komunal Desa Bangunsari Kec. Pageruyung
- IPAL Komunal Desa Wadas Kec. Plantungan
- IPAL Komunal Desa Jati Kec. Plantungan
- IPAL Komunal Desa Puguh Kec. Boja
- IPAL Komunal Desa Mojoagung Kec. Plantungan
- IPAL Komunal Desa Sidokumpul Kec. Patean
- TS INDIVIDUAL 50KK Desa Pakisan Kec. Patean
- TS INDIVIDUAL 50KK Desa Sidokumpul Kec. Patean
- TS INDIVIDUAL 50KK Desa Petung Kec. Pageruyung
- TS INDIVIDUAL 50KK Desa Selokaton Kec. Sukorejo
- TS INDIVIDUAL 50KK Desa Bendosari Kec. Plantungan
- TS INDIVIDUAL 50KK Desa Sidodadi Kec. Patean
- IPAL Komunal Desa Selokaton Kec. Sukorejo
- IPAL Komunal Desa Bendosari Kec. Plantungan

- IPAL Komunal Desa Petung Kec. Pageruyung

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya gedung layak fungsi termasuk rencana pembangunan Rumah Dinas Jabatan untuk Forkompinda. Pada program ini direncanakan Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota, Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

g. Program Penataan bangunan dan Lingkungannya

Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2026, penataan bangunan direncanakan pada penataan trotoar di Kecamatan Kendal untuk mendukung penataan wajah kota Kabupaten Kendal.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diwujudkan memalui kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi, Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis dan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib

Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi, dan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini dilaksanakan untuk mendukung penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah. Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang dan Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota.
3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota dengan sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota dengan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

5.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 difokuskan pada penurunan luasan kawasan permukiman kumuh, peningkatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh melalui peningkatan jumlah rumah layak huni, peningkatan kualitas perumahan dengan PSU di Kawasan kumuh. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan kumuh maupun luar kumuh juga menjadi salah satu fokus kegiatan sebagai salah satu upaya pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai SPM, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Pada urusan Perumahan Rakyat indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Persentase Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak 66,1 %;
- Persentase luas Kawasan Kumuh 0,5 %;
- Persentase Rumah Layak Huni 90,11 %;

- Persentase capaian penanganan kawasan kumuh 0,1138%;
- Persentase PSU Perumahan yang diserahkan 27,69%; dan

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diprioritaskan untuk rehabilitasi rumah korban bencana serta pengelolaan Rusunawa. Program ini diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.
4) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman

Dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, pemerintah pusat melaksanakan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang menyasar ke 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota di 12 (dua belas) provinsi di seluruh Indonesia. Untuk menindaklanjuti program pemerintah tersebut, program ini dilaksanakan untuk penataan kawasan kumuh yang berlokasi di kelurahan Bandengan dan kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal. Melalui program ini, diharapkan luas kawasan kumuh dapat berkurang dan akan mengentaskan daerah kumuh. Program Kawasan Permukiman diwujudkan melalui Kegiatan:

1) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, dan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh.
3) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha, dengan sub kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, dan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini dilaksanakan untuk mendukung perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Perbaikan RTLH ini mendukung pencapaian *Universal Access*, sehingga menjadi salah satu kegiatan yang menjadi fokus pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pada program ini juga dilaksanakan penataan kawasan kumuh, sehingga diharapkan luasan kawasan kumuh dapat berkurang dengan semakin tertatanya kawasan yang saat ini termasuk dalam kawasan kumuh, dan berkurangnya RTLH pada kawasan tersebut. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Ulitilas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan untuk mendukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada perumahan. PSU sangat diperlukan untuk menunjang fungsi hunian yang ada, tetapi program ini hanya untuk perumahan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Perencanaan penyediaan PSU Perumahan, Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

Pada program ini akan dilaksanakan pembuatan senderan untuk makam Pancasila dan pemenuhan PSU pada perumahan yang telah diserahkan kepada Pemda.

5.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 difokuskan pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, menjaga keharmonisan dan kondusivitas wilayah. Hal itu dilaksanakan melalui penegakan Perda, peningkatan disiplin aparatur serta peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM. Selain itu, pada urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga berfokus pada peningkatan ketahanan daerah dalam penanganan bencana. Hal ini dilaksanakan melalui penerapan strategi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, baik melalui pemberdayaan masyarakat maupun sosialisasi, komunikasi dan informasi ke daerah rawan bencana. Selain itu, *early warning system* dan prasarana pencegahan bencana juga turut menjadi salah satu upaya untuk pencegahan dampak bencana. Penanganan kebakaran sesuai dengan standar tingkat waktu tanggap (*respon time*) juga menjadi salah satu hal yang harus terus diperbaiki, diantaranya dengan mencukupi sarana prasarana pendukung pemadaman kebakaran. Program dan kegiatan pada urusan ketertiban dan ketentraman juga mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada pencapaian target kinerja berikut :

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas 82,32 Poin;
- Persentase Kesiapsiagaan Damkar 100%;
- Persentase penurunan gangguan Trantibum sebesar 15%;
- Tingkat waktu tanggap kebakaran (*respond time rate*) 98%;
- Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,72 Poin;
- Indeks Pencapaian SPM sebesar 100%; dan
- Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 82,93 – 81,39 poin.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program ini dilaksanakan untuk menjaga kondusifitas wilayah melalui patroli keamanan serta penanganan aduan masyarakat. Pengawasan terhadap Perda dan penindakan pelanggar Perda serta penanganan atas dampak pelanggaran Perda juga menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini. Program ini diwujudkan melalui:

   1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan diantaranya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan mendukung untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kendal. Pada program ini juga dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan kebakaran dan penanganan kebakaran.

Program ini diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK), Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, dengan sub kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran.
3) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran dengan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
4) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi, dan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan indeks ketahanan bencana daerah, melalui pemberian bantuan kebutuhan dasar untuk korban bencana, pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan kesiap siagaam terhadap bencana, dalam hal ini salah satunya adalah pengelolaan Distana atau Desa Tangguh Bencana. Sosialisasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat juga menjadi salah satu prioritas yang dapat meminimalkan dampak korban bencana. Selanjutnya, pelaksanaan Sosialisasi terhadap masyarakat rawan bencana dan *early warning systems* pencegahan bencana juga dibiayai melalui program ini.

Program Penanggulangan Bencana diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).
2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan diantaranya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan sub kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan, Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.

Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) merupakan acuan atau dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana. Hasil dari pengkajian risiko bencana menentukan arah rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal. Sebagai dasar perencanaan, pengkajian risiko bencana disusun secara selaras dengan perencanaan penanggulangan bencana Kabupaten Kendal dengan melaksanakan pembaharuan 5 (lima) tahun sekali yang diintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Kendal. Sedangkan untuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kendal telah disusun untuk periode perencanaan lima tahun (2023-2027) merupakan pedoman utama dalam keseluruhan pelaksanaan penanggulangan bencana pada seluruh tahapan yaitu: Pra Bencana, Saat Bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca Bencana di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kebencanaan, salah satu prioritas pendukungnya yaitu pembangunan gedung untuk penyimpanan logistik dan peralatan di lingkungan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal.

5.2.6 Sosial.

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial, dan peningkatan sinergitas penanganan kemiskinan serta pencapaian SPM bidang Sosial. Program dan kegiatan pada indikator ini juga mendukung pencapaian prioritas nasional yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Pada urusan Sosial indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Persentase penanganan PPKS sebesar 100%; dan
- Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti sebesar 92%.

  Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan peran serta PSKS. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana hal ini sangat penting untuk upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat yang berada dalam DTSEN tersebut. Validasi DTSEN menjadi salah satu cara untuk memberikan bantuan dengan tepat sasaran. Santunan kematian bagi masyarakat yang masuke ke dalam data kesejahteraan sosial Kabupaten Kendal. Pada program ini juga dilaksanakan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dengan menggunakan dana DBHCHT. Diharapkan bantuan–bantuan ini dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat. Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah kantong–kantong kemiskinan, menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah, serta membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, Rujukan Anak-Anak Terlantar, dan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.
2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapaianya SPM pada urusan Sosial. SPM pada urusan sosial ditujukan untuk penyediaan kebutuhan dasar

bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Selain itu, program ini juga mendukung agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.

Program Rehabilitasi Sosial diwujudkan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, melalui sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dan Pemberian Layanan Rujukan.
2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, dan Pemberian Layanan Rujukan serta Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini dilaksanakan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada masa tanggap darurat bencana. Program ini dilaksankan melalui kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan, dan Pelayanan Dukungan Psikososial, dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Koordinasi, dan Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung terkelolanya Taman Makam Pahlawan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Sesuai dengan SPM, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial seharusnya mempunyai rumah singgah/shelter untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Program ini diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan Pembangunan Gedung.

5.3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.3.1 Tenaga Kerja

Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2026 difokuskan pada penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja serta pembinaan kepada industri kecil menengah. Program dan kegiatan pada urusan tenaga kerja mendukung prioritas nasional yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pada urusan Ketenagakerjaan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.99-4.69%;
- Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,87%;
- Persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 0,91%;
- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp1.000.000/Orang;
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 67,64%; dan
- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 46,37%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan untuk pelatihan ketrampilan kepada calon pencari kerja, pelatihan siap kerja, penyiapan SDM berkualitas sesuai dengan

kebutuhan lapangan kerja, Program pemagangan dan *Traning Need Analysys* (TNA). Program pelatihan yang dilaksanakan melalui program ini adalah pelatihan–pelatihan siap kerja, seperti pelatihan menjahit (garmen), perbengkelan, tata rias, tata busana, servis *handphone*, *design graphic*, dan sejenisnya. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga diharapkan selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat langsung bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Untuk mencegah berulangnya mengikuti pelatihan yang sama, maka pelatihan dilaksanakan berbasis NIK, sehingga dapat dilihat pelatihan apa saja yang pernah diikuti.

Program ini diwujudkan melalui Kegiatan, diantaranya:

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
3) Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan untuk perluasan kesempatan kerja kepada angkatan kerja, baik melalui padat karya, pelatihan kewirausahaan maupun melalui aplikasi Kendal Karir. Pelaksanaan *Job Fair* juga menjadi salah satu upaya untuk menurunkan pengangguran. *Job Fair* ini dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan "Kendal *Open Fair*", sehingga diharapkan semakin banyak angkatan kerja yang dapat berpartisipasi dan mendapatkan pekerjaan. Pada program ini juga dilaksanakan padat karya sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan padat karya direncanakan pada Kecamatan Patebon (Desa Kebonharjo), Kecamatan Ringinarum (Desa Mojo), Kecamatan Plantungan (Desa Mojoagung), Kecamatan Patean (Desa Gedong, Desa Curugsewu, Desa Mlatiharjo, Desa Pagersari, Desa Selo), Kecamatan Sukorejo (Desa Purwosari), Kecamatan Kangkung (Desa Truko, Desa Sukodadi, Desa Sendang Dawung, Desa Sendangkulon, Desa Kaliyoso), Kecamatan Cepiirng (Desa Juwiring, Desa Botomulyo, Desa Kalirandugede), dan Kecamatan Rowosari (Desa Bulak, Desa Tanjungsari).

Program ini diwujudkan melalui Kegiatan, diantaranya:

1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Job Fair/Bursa Kerja.
2) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, dan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

5.3.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 difokuskan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua Perangkat Daerah, pembentukan desa layak anak, pengembangan sekolah ramah anak, pendampingan dan advokasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pendampingan industri rumahan. Program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Pada urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja, yaitu :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 94,35;

- Indeks Perlindungan Anak sebesar 64,35;
- Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 73,36;
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,192-0,178;
- Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 7,82;
- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 77,24; dan
- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 64,14.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Kendal, pembentukan desa layak anak, dan pembinaan industri rumahan. PUG dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah. Pelaksaan program ini didukung oleh Kegiatan, diantaranya:

1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaen/Kota dan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan untuk pendampingan dan advokasi bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini untuk mendukung capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan:

1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, yang diwujudkan dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini dilaksanakan untuk pengembangan sekolah ramah anak. Untuk itu, pada program ini dilaksanakan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu juga diwujudkan melalui kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan untuk pendampingan dan advokasi bagi anak korban kekerasan. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA, dan Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.3.3 Pangan

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 difokuskan pada pegembangan lumbung pangan, stabilisasi kecukupan ketersediaan bahan kebutuhan pokok/komoditas pertanian untuk peningkatan ketersediaan pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang. Program dan kegiatan pada urusan Pangan dilaksanakan untuk mendukung prioritas daerah sesuai arah kebijakan Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur serta mendukung prioritas pembangunan nasional, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pada urusan Pangan, indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu:

- Indeks ketahanan pangan sebesar 86,37; dan
- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan sebesar 9,50 %.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini dilaksanakan untuk pengembangan lumbung pangan, dengan melaksanakan pembinaan terkait pengelolaan lumbung pangan, pemberdayaan masyarakat untuk keanekaragaman pangan dan memastikan kecukupan cadangan pangan.

Program ini diwujudkan melalui Kegiatan, diantaranya:

1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis, Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan untuk mengatasi kerawanan pangan. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

5.3.4 Pertanahan.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 yang akan dilaksanakan fokus pada Pemenuhan kebutuhan akan data/informasi pertanahan, penyediaan lahan pengganti dan sertifikasi tanah milik Pemda.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program sebagai berikut:

a. Program Penatagunaan Tanah.

Program ini dilaksanakan untuk sertifikasi tanah milik Pemda. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

5.3.5 Lingkungan Hidup.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, pengelolaan RTH, dan pengelolaan sampah.

Program dan kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup juga diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pada urusan Lingkungan Hidup indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,05;
- Indeks kualitas Air sebesar 49,31;
- Indeks kualitas udara sebesar 83,29;
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 58,34;
- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah sebesar 1,22%; dan
- Cakupan RTH Publik yang terkelola sebesar 13,01%; dan Persentase pengendalian kerusakan lingkungan sebesar 60%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Program ini dilaksanakan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pemantauan dan peningkatan kualits air, dan udara.

   Program ini diwujudkan melalui:

   1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengelolaan RTH merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas udara. Pada tahun 2026 mendatang pengelolaan RTH diarahkan pada peningkatan infrastruktur RTH secara modern, ramah anak dan disabilitas, RTH yang direncanakan pemeliharaan adalah :

- Pemeliharaan RTH Kaliwungu
- Pemeliharaan RTH Boja
- Pemeliharaan RTH di Kecamatan Kendal
- Pemeliharaan RTH di Kecamatan Weleri
- Pemeliharaan RTH di Kecamatan Sukorejo
- Pemeliharaan RTH di Kecamatan Patebon
- Pemeliharaan RTH di Kecamatan Brangsong

Selain untuk pengelolaan RTH, program ini juga dilaksanakan untuk pembinaan kelompok Proklim. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) diwujudkan melalui Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dilaksanakan untuk mengurangi dan mengendalikan limbah bahan berbahaya dan beracum (Limbah B3) agar tidak mencemari lingkungan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3, dan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3

dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Program ini dilaksanakan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

   Program ini dilaksanakan untuk menangani pengaduan masyarakat dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Program ini diwujudkan melalui Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

i. Program Pengelolaan Persampahan

   Pengelolaan persampahan menjadi hal yang penting, untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat dan tidak tercemar. Melalui program ini, Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pengelolaan persampahan. Pengelolaan

sampah dilaksanakan melalui pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Darupono, pelaksanaan *controlled sanitary landfill*, peningkatan jumlah Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (TPS3R) dan alat pengolahan sampah lainnya juga menjadi salah satu pendukung pengelolaan sampah, pengolahan sampah secara modern dan aktivasi bank sampah serta peningkatan kapasitas KPP TPS3R di Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota, Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, dan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan.
2) Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta dengan sub kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

5.3.6 Kependudukan dan Catatan Sipil.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik melalui *Smart Government*. Peningkatan pelayanan tersebut meliputi peningkatan layanan pendaftaran penduduk, peningkatan layanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 93,18 poin; dan
- Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP. KIA. dan Akta Kelahiran) sebesar 91,39 %.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini dilaksanakan untuk pelayanan pendaftaran penduduk. Pelayanan pendaftaran penduduk ini meliputi: penerbitan KTP elektronik, penerbitan KK, penerbitan KIA, penerbitan SKTT, Surat keterangan pindah WNI dan Surat Keterangan Datang WNI serta pelayanan IKD. Untuk mempermudah masyarakat, selain dilaksanakan pelayanan tatap muka di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelayanan *online*, juga dilaksanakan pelayanan keliling pada hari kerja maupun hari libur untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, dan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk melalui sub kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini dilaksanakan untuk pelayanan pencatatan sipil, yang meliputi penerbitan akte kelahiran, akte kematian, akte pengangkatan anak, pembatalan akte kelahiran, akte perkawinan untuk non muslim, akte perceraian untuk non muslim, akte pengakuan dan pengesahan anak. Untuk pelayanan akte kelahiran dan kematian akan dilaksanakan pelayanan keliling untuk menjaring lebih banyak masyarakat dalam kepemilikan akte kelahiran dan akte kematian. Program ini diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini dilaksanakan untuk pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Dispendukcapil mempunyai aplikasi PAK KADES MANTAP untuk

memudahkan akses masyarakat. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.
2) Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
3) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencukupi kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor serta perlengkapan untuk mendukung pelayanan Dispendukcapil, yang diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5.3.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan desa menuju desa mandiri melalui penataan desa, pelaksanaan TMMD, peningkatan administrasi desa, dan peningkatan pendapatan desa melalui peningkatan BUMDES. Program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mendukung prioritas nasional yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Persentase Desa Mandiri sebesar 24,44 %; dan
- Persentase desa yang naik statusnya sebesar 6,02%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi penataan wilayah desa, yang diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan untuk pembinaan kepada desa terkait dengan administrasi desa. Pembinaan kepada desa meliputi pembinaan administrasi desa, pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa maupun pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa serta pembinaan dan pengembangan BUMDES. Pembinaan kepada desa ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status desa menjadi desa mandiri. Program Administrasi Pemerintahan Desa diwujudkan melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan diantaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan termasuk didalamnya RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan

Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

d. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kerjasama antar desa dalam rangka pembangunan desa, yang diwujudkan melalui Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

5.3.8 Pengendalian Penduduk dan KB

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB. Program dan kegiatan pada urusan pengendalian penduduk dan KB juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas daerah yaitu Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal, dan prioritas nasional yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Pada urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) sebesar 63,92 - 63,98;
- Total Fertility Rate 2,05 poin; dan
- Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi sebesar 90,86 %.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, sosialisasi kepada masyarakat, pengendalian dan distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, pelayanan KB ke masyarakat. Selain itu, juga dilakukan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan kesertaan Ber-KB, dan melakukan promosi keluarga berencana melalui berbagai media salah.

Program ini diwujudkan melalui Kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan sub kegiatan Pengendalian Program KKBPK, Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai

Penyuluhan Bangga Kencana, Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal, dan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.

2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan sub kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, Pembinaan Terpadu Kampung KB, dan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

b. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilaksanakan untuk mengendalikan angka kelahiran (TFR) dengan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, yang diwujudkan melalui Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan sub kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan

Masyarakat Binaan dan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal, dan Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kendal. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan pembinaan kepada keluarga, melalui posyandu ataupun melalui kader ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yang ada di tingkat desa. Program ini diwujudkan melalui:

1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
2) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sub kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

5.3.9 Perhubungan.

Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, pemenuhan kelengkapan jalan dan layanan angkutan terintegrasi. Program pada urusan perhubungan juga dilaksanakan untuk peningkatan sarana prasarana perhubungan, peningkatan kualitas perlengkapan lalu lintas, pembangunan palang pintu kereta api dan

peningkatan manajemen lalu lintas serta optimalisasi pelabuhan. Program dan kegiatan dilaksanakan untuk mendukung prioritas daerah yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata, dan prioritas nasional yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Pada urusan Perhubungan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Rasio Konektivitas wilayah sebesar 0,6723;
- Indeks Pelayanan Transportasi sebesar 0,41808;
- Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota sebesar 31,00%;
- Persentase kelengkapan fasilitas sarana prasarana pelayaran sebesar 52,00%; dan
- Indeks Keterlayanan Trayek Angkutan sebesar 0,80313.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

   Program ini dilaksanakan untuk rekayasa lalu lintas, pengadaaan dan pemasangan Rambu Pendahululu petunjuk jurusan (RPPJ), pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan jalan termasuk rambu, marka, maupun Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pemasangan PJU pada jalan sesuai kewenangan, pengadaan *armature* lampu, pemantauan lalu lintas melalui CCTV, pengembangan transportasi umum ke Kawasan wisata dan penambahan pintu perlintasan kereta api sebidang.

   Pemasangan LPJU direncanakan pada titik lokasi diantaranya:

- Jl. Sukarno Hatta Kendal
- Wilayah Kelurahan Balok Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Bandengan Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Banyutowo Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Bugangin Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Candiroto Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Jetis Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Jotang Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Kalibuntu Wetan Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Karangsari Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Kebondalem Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Ketapang Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Langenharjo Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Ngilir Kec. Kendal

- Wilayah Kelurahan Patukangan Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Pengulon Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Sukodono Kec. Kendal
- Jl. Boja – Kaliwungu Kec. Boja
- Jl. Cangkring – Gonoharjo
- Jl. Kaliwungu – Mororejo
- Jl. Medono – Pasigitan
- Jl. Ngareanak – Banyuringin
- Jl. Timur Sungai Waridin
- Jl. Raya Glagah - Gemuh
- Wilayah Kelurahan Pakauman Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Sijeruk Kec. Kendal
- Wilayah Kelurahan Trompo Kec. Kendal
- Jl. Boja – Tamanrejo Kec. Boja
- Jl. Jenarsari – Caruban
- Jl. Kertosari - Goa Kiskendo
- Jl. . Mojo - Kedungasri
- Jl. Rejosari - Sidorejo
- Jl. Cangkiran – Gonoharjo
- Pegandon – Gersan

Pemasangan pintu perlintasan kereta api sebidang dilaksanakan pada Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon dan Desa Penaruban kecamatan Weleri.

Keberhasilan program ini diwujudkan melalui Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
3) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
4) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal dan pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
5) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.3.10 Komunikasi dan Informatika.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan secara elektronik. Selain itu, pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika juga difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur TIK, pengembangan digitalisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan pembuatan Super Aplikasi. Program dan kegiatan pada urusan ini mendukung mencapaian prioritas nasional yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Pada urusan Komunikasi dan Informatika indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Pemerintah Digital sebesar 2,0 Poin;
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP) sebesar 96,33; dan
- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 50,02%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini dilaksanakan untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur TIK Pemda, pemasangan *hotspot* di area publik, pengembangan SPBE, penyediaan jaringan internet di perkantoran dan hotspot area publik, serta pengembangan aplikasi termasuk Super Aplikasi (Super App). Pada program ini juga dilaksanakan untuk pemasangan videotron yang direncanakan pada Stadion Utama Kebondalem, Kecamatan Weleri, Kecamatan Boja dan Kecamatan Brangsong. Selain itu, juga untuk perbaikan videotron yang sudah ada.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.
2) Kegiatan Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda, Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah, Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, Koordinasi

dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE, dan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

b. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dilaksanakan untuk mendorong keterbukaan informasi publik, *media handling* dan operasional radio Swara Kendal, yang diwujudkan melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Relasi Media, Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Pelayanan Informasi Publik, Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin perkantoran, termasuk pengadaan peralatan studio untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

5.3.11 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas usaha mikro, peningkatan kualitas koperasi dan pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi. Program dan kegiatan pada urusan koperasi dan usaha mikro kecil menengah juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, serta mendukung prioritas daerah yaitu Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam.

Pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Rasio Kewirausahaan Daerah sebesar 3,05%;
- Persentase pertumbuhan unit usaha mikro 6,72%; dan
- Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 1,89%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengembangan UMKM

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Kendal. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan berkaitan dengan manajemen, maupun promosi serta *branding* UMKM agar dapat lebih dikenal masyarakat. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dilaksanakan untuk mendorong pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil, inkubasi UMKM, dan digitalisasi UMKM.

Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dilaksanakan melalui pelatihan, pembinaan serta pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Selain itu, juga dengan memudahkan perizinan–perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mem*branding* produknya. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Program ini dilaksanakan untuk melakukan pembinaan kepada koperasi, sehingga diharapkan koperasi yang ada dapat menjadi koperasi aktif. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

d. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini dilaksankaan untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha untuk koperasi. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dilaksanakan untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait tata kelola kelembagaan koperasi. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, dan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini dilaksanakan untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

g. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini dilaksanakan untuk pembinaan koperasi, dan akan dilaksanakan pembubaran koperasi yang tidak aktif. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

5.3.12 Penanaman Modal.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatkan kualitas pelayanan, kemudahan investasi, dan promosi penanaman modal. Program dan kegiatan pada urusan ini dilaksanakan juga untuk mendukung prioritas nasional yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, serta mendukung prioritas daerah yaitu Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam.

Pada urusan Penanaman Modal indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Persentase peningkatan investasi sebesar 6,40%;
- Nilai Investasi Daerah sebesar 9,04 Triliun Rupiah; dan
- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 88,50.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan untuk mendukung iklim penanaman modal di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dilaksanakan melalui pemberian insentif/fasilitas kemudahan penanaman modal kepada investor, dan penyusunan peta potensi investasi di Kabupaten Kendal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
2) Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan promosi penanaman modal. Promosi dilakukan melalui pameran yang diselenggarakan oleh kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu juga dilaksanakan penyusunan strategi promosi, sehingga diharapkan selain promosi melalui pameran juga dapat melalui media lain untuk menjaring semakin banyak investor yang berinvestasi di Kabupaten Kendal. Promosi Penanaman Modal diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dilaksankaan untuk pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kendal. Diharapkan pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dapat lebih memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan. Program Pelayanan Penanaman Modal diwujudkan melalui Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penamanan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, dan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksankaan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan pengawasan penanaman modal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan Pengawasan Penanaman Modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

5.3.13 Kepemudaan dan Olah Raga.

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan maupun perekonomian. Program dan kegiatan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, serta mendukung prioritas daerah yaitu Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal.

Pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 60,35;
- Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) sebesar 0,3357;
- Persentase Atlet yang Berprestasi sebesar 70,55%; dan
- Tingkat pemuda berprestasi sebesar 49,82%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini dilaksanakan untuk memasyarakatkan olahraga, meningkatkan jumlah atlet berprestasi dan menyediakan sarana prasarana olahraga yang memadai.

Upaya untuk pemasyarakatan olahraga ini meliputi penyelesaian GOR dan *Youth Centre,* pembangunan UMKM *Centre* di Stadion Utama Kebondalem, dan penataan kawasan di Stadion Utama Kebondalem, penyelenggaraan *event–event* atau kejuaraan olahraga, pengembangan olahraga tradisional, maupun olahraga rekreasi.

Dalam rangka peningkatan jumlah atlet berprestasi, maka dilaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk atlet dan pelatih, serta pemberian hadiah untuk atlet berprestasi dan pelatihnya. Selain pembangunan GOR dan *Youth Centre* di Stadion Utama Kebondalem, juga dilaksanakan pemeliharaan bangunan stadion utama.

Program ini diwujudkan melalui Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota, dan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota.
3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, dan pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota.
4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan sub kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota, dan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait.
5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi, Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan, Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat, dan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing pemuda di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan untuk pemuda, pendidikan karakter untuk pemuda, serta program pengembangan *Santripreneur*, atau santri berwirausaha. Diharapkan dengan semakin banyaknya pemuda yang berwirausaha, akan berdampak pada peningkatan ekonomi di masyarakat.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota, Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota, dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota.
2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kapasitas kepramukaan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah, dan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah.

5.3.14 Statistik.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas satu data. Program dan kegiatan pada urusan statistik dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada urusan Statistik indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,05 poin.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini mendukung pengembangan digitalisasi lingkungan Pemkab Kendal dan mendukung Satu Data Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan melalui pengembangan aplikasi KUDASAKTI, serta membangun metadata statistik sektoral.

Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

5.3.15 Persandian

Pada urusan Persandian, rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas persandian. Program dan kegiatan pada urusan ini juga mendukung prioritas nasional yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pada urusan Persandian indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebesar 407 poin.
Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Program ini mendukung keamanan informasi dan keamanan data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas persandian diantaranya melalui pengadaan *firewall* untuk OPD, pengadaan lisensi SSL dan *firewall*, pemeliharaan/revitalisasi jaringan telepon (PHKS) dan monitoring dan evaluasi jaringan telepon. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.3.16 Kebudayaan.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda. Program dan kegiatan pada urusan kebudayaan, juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, serta mendukung arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur pembangunan.

Pada urusan Kebudayaan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan sebesar 30,00%; dan
- Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Benda (WBB) yang dilestarikan sebesar 23,31%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pembinaan Sejarah

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan lembaga sejarah lokal di Kabupaten Kendal dengan tujuan pelestarian budaya lokal. Program Pembinaan Sejarah diwujudkan melalui Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota.

b. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kendal yang dilaksanakan melalui *event* kesenian budaya lokal. Diharapkan masyarakat dapat semakin familiar dengan kebudayaan di Kabupaten Kendal, dan dapat bersama–sama menjaga warisan budaya di Kabupaten Kendal. Program Pengembangan Kebudayaan diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan dan sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.
2) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.

c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional di Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, dan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dilaksanakan untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya di Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini dilaksanakan untuk mengelola museum di Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu.

5.3.17 Kearsipan.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan untuk mendorong keamanan arsip daerah dan pengelolaan arsip daerah. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Pada urusan Kearsipan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah sebesar 86,60;
- Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal sebesar 93,64; dan
- Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal sebesar 75,90.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan melalui program berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip. Program ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan arsip sesuai standar, dan melestarikan arsip daerah yang ada. Dalam rangka mendukung pengelolaan arsip, dilaksanakan pembinaan pengelolaan arsip daerah pada tingkat kelurahan di Kabupaten kendal, yang nantinya akan dilaporkan ke ANRI untuk mewujudkan arsip memori kolektif bangsa dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Selain itu, pada program ini juga dilaksanakan layanan SIAGA atau layanan duplikasi arsip keluarga. Pengadaan sarana LKD juga menjadi prioritas pada program ini, karena pengadaan sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk pengelolaan arsip hasil likuidasi dan melaksanakan program digitalisasi arsip. Program Pengelolaan Arsip diwujudkan melalui Kegiatan sebagai berikut:

   1) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN.

2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis.
3) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah. Program ini diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

1) kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dengan sub kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun, Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun,
2) kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
3) kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan sub kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
4) kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip,
5) kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang dengan sub kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini dilaksanakan untuk pelayanan izin penggunaan arsip daerah. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan

dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

5.3.18 Perpustakaan.

Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada usaha peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca. Program dan kegiatan pada urusan perpustakaan juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas serta mendukung arah kebijakan pembangunan daerah yaitu Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur pembangunan.

Pada urusan Perpustakaan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 48,9; dan
- Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan 0.26%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan melalui Program–program berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melalui penambahan bahan bacaan baik buku fisik maupun *e-book*, dan mengadakan *event–event* perpustakaan berupa lomba–lomba untuk sekolah atau masyarakat serta pemeliharaan dan penyelesaian gedung perpustakaan baru. Selain itu, juga dilaksanakan layanan PUTARAUDIKA yaitu antar jemput siswa PAUD untuk berkunjung ke Perpustakaan, dan juga melakukan pembinaan ke perpustakaan–perpustakaan desa agar masyarakat desa dapat mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan desa yang ada. Pada pelaksanaannya, program ini diwujudkan melalui :
   1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, dan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan.

2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, dan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, baik perpustakaan maupun gedung arsip dan depo arsip dan penyelesaian Lantai 2 Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal.

5.4 Urusan Pilihan

5.4.1 Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan pada urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan. Selain itu juga difokuskan pada pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitasi pengembangan usaha perikanan skala mikro dan kecil serta pengolahan hasil perikanan. Program dan kegiatan pada urusan kelautan dan perikanan juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta mendukung prioritas daerah yaitu Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam.

Pada urusan Kelautan dan Perikanan, indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Nilai produksi perikanan sebesar Rp.334.833.823.620;
- Nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp.101.470.434.000;
- Nilai produksi perikanan budidaya sebesar Rp.219.380.700.000; dan
- Nilai produksi pengolahan hasil perikanan sebesar Rp. 13.982.689.620.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan untuk peningkatan produksi pengelolaan budidaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan, pelatihan intensifikasi budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi, serta meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang tergenang rob (lahan *iddle*) untuk dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai tambak. Pada program ini juga direncanakan untuk rehabilitasi Balai Benih Ikan di Desa Purwogondo Kecamatan Boja. Pengelolaan Perikanan Budidaya diwujudkan melalui Kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, dan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap melalui peningkatan kapasitas nelayan, pemberian bantuan kepada nelayan, serta pengelolaan TPI dan pembangunan maupun rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Selain itu, pada program ini juga direncanakan pengadaan tanah untuk tambatan perahu di Bandengan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
3) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, dan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan untuk membantu pengembangan pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Pembinaan dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan dalam pengolahan perikanan maupun pemasaran hasil perikanan maupun olahannya. Program ini diwujudkan melalui kegiatan

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko, dan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.4.2 Pariwisata.

Rencana program dan kegiatan pada urusan Pariwisata di tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur wisata, peningkatan promosi wisata untuk peningkatan kontribusi dalam PAD, peningkatan *event-event* kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, peningkatan pengelolaan desa wisata serta pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal. Program dan kegiatan juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, serta mendukung prioritas daerah yaitu Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam.

Pada urusan Pariwisata indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- PAD Sektor Pariwisata (Semua DTW) sebesar Rp.13.797.432.364;
- Persentase peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 4,34%;
- Jumlah tamu wisatawan mancanegara sebesar 180 Orang;
- Jumlah tamu wisatawan Nusantara sebesar 1.890.000 Orang; dan
- Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan sebesar 71,67%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

Program ini dilaksanakan untuk peningkatan destinasi wisata melalui rehabilitasi destinasi wisata dan perbaikan manajemen pengelolaan destinasi wisata. Rehabilitasi destinasi wisata yang akan dilaksanakan adalah meneruskan pembangunan DTW Curug Sewu, pembangunan DTW Sendang Sikucing dan pembangunan DTW Kolam Renang Boja. Diharapkan dengan semakin baiknya sarana prasarana pada DTW, akan semakin banyak pengunjung ke DTW tersebut, sehingga berpotensi pada peningkatan PAD

Kabupaten Kendal. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata diwujudkan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilaksanakan untuk pemasaran pariwisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kendal. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya penyelenggaraan *event* tahunan, dan promosi pada media cetak maupun elektronik. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, dan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan sub kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Sistem Pemasaran, dan Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola pariwisata, dengan melaksanakan pelatihan–pelatihan kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, dan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2) Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, melalui sub kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif, dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif.

5.4.3 Pertanian.

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Selain itu juga fokus pada peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani. Program dan kegiatan pada urusan pertanian juga dilaksankan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta mendukung prioritas daerah yaitu meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada urusan Pertanian indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Nilai produksi pertanian sebesar Rp6.737.843.237.969;
- Produktivitas pertanian padi sebanyak 57,25 Kuintal/hektar per tahun;
- Produktivitas pertanian jagung sebanyak 70,63 Kuintal/hektar per tahun;
- Produktivitas pertanian bawang merah sebanyak 95,80 kuintal/hektar per tahun;
- Produktivitas pertanian cabe sebanyak 70,63 kuintal/hektar per tahun;
- Produktivitas pertanian kopi sebanyak 8,40 kuintal/hektar per tahun;
- Produktivitas pertanian Tembakau sebanyak 15,40 kuintal/hektar per tahun;
- Produksi daging sapi sebanyak 1.620 ton;
- Produksi daging ayam ras sebanyak 20.800 ton; dan
- Produksi telur ayam ras sebanyak 94.740 ton.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana pertanian bagi petani untuk peningkatan kualitas hewan dan tanaman. Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian, melalui sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
2) Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/tanaman, sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG hewan/tanaman, dan sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.
4) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk menyediakan prasarana pertanian, diantaranya jalan usaha tani, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani. Selain itu juga dilaksanakan rehabilitasi dan pembangunan BPP serta pengelolaan Rumah Potong Hewan. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, dan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya, sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dan sub

kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan hewan, peningkatan pelayanan jasa medik veteriner, serta pengawasan produk hewan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk pencegahan, pengendalian serta penanggulangan bencana pertanian. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk mendukung penyuluhan pertanian kepada petani, diantaranya pelatihan untuk peningkatan hasil pertanian maupun *branding* petani. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian, melalui sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa, Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani.

5.4.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada dukungan untuk pengembangan desa mandiri energi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pada urusan energi dan sumber daya mineral, indikator kinerja diarahkan untuk target kinerja persentase energi terbarukan yang diawasi sebesar 100%. Dalam upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Melalui program ini dilaksanakan dukungan untuk pengembangan dan peningkatan desa mandiri energi. Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan pendampingan terkait energi baru terbarukan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5.4.5 Perdagangan

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas ekspor, penataan ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen serta peningkatan sarana prasarana perdagangan. Program dan kegiatan pada urusan perdagangan juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta mendukung prioritas daerah yaitu Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada urusan Perdagangan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54 %; dan
- Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,71%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

   Program ini dilaksanakan untuk peningkatan sarana prasarana pada pasar dan rehabilitasi/revitalisasi pasar pada pasar–pasar yang menjadi kewenangan kabupaten untuk meningkatkan jumlah pasar dengan sertifikat layak fungsi. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan sebagai berikut:

   1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
   2) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan sub kegiatan Pembinaan dan

Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

b. Program Pengembangan Ekspor

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ekspor di Kabupaten Kendal. Kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan nilai produk, maupun keikutsertaan pada pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional termasuk. Pada program ini juga dilaksanakan untuk UMKM Expo, pelaksanaan Kendal *Open Fair.* Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan, Pameran Dagang Nasional, Peningkatan Citra Produk Ekspor, dan Pameran Dagang Lokal.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan barang dan kestabilan harga barang di pasaran. Salah satunya melalui *e-bapokting*, yang mendukung ketersediaan informasi harga komoditas bahan pangan pokok dan penting yang diupdate setiap hari, selain dapat diakses secara *online*, juga disajikan pada *running text* di pasar. Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

1) Kegiatan Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, serta sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
2) Kegiatan Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
3) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

5.4.6 Perindustrian.

Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan

industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi serta mendukung prioritas daerah yaitu Meningkatkan kontribusi sektor perekonomian unggulan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada urusan Perindustrian indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan sebesar 43,03%; dan
- Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 51,18%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Program ini dilaksanakan untuk menyusun dan mengevaluasi pembangunan industri di Kabupaten Kendal. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan Industri Kecil Menengah yang sudah terdaftar. Pembinaan yang dilaksanakan meliputi pelatihan–pelatihan dan pendampingan setelah dilaksanakan pelatihan. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

   Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengendalian izin usaha industri di Kabupaten Kendal dan meningkatkan IKM yang memiliki Izin Usaha Industri. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

   Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan pengelolaan data industri di Kabupaten Kendal. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan

dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

5.4.7 Transmigrasi.

Rencana program dan kegiatan urusan transmigrasi pada tahun 2026 akan difokuskan pada penjajakan calon lokasi transmigrasi dan penyiapan ketrampilan calon transmigran.

Pada urusan Transmigrasi indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu Persentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan sebesar 50%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Pada program ini dilaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigran, dan juga fasilitasi pemberangkatan calon transmigran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.5.1 Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN, serta mendukung terwujudnya sistem Merit. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada urusan Kepegawaian indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Sistem Merit sebesar 255,50;
- Indeks Profesionalisme ASN dengan skor 82,50;
- Nilai aspek perencanaan kebutuhan. pengadaan. pengembangan karir. promosi mutasi. dan manajemen kinerja sebesar 167,50;
- Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi sebesar 88,00; dan
- IP ASN dimensi kualifikasi, Kinerja, Disiplin sebesar 52,00.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan Program Kepegawaian Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan profesionalisme ASN dan pengelolaan data ASN. Peningkatan profesionalisme ASN diantaranya melalui penegakan disiplin ASN, peningkatan penilaian kinerja ASN,

dan pengembangan karir berbasis Sistem Merit. Sedangkan untuk pengelolaan data ASN dilaksanakan dengan *updating* dan pemeliharaan Aplikasi SIMPEG, sehingga memudahkan dalam pengadministrasian data ASN.

Program Kepegawaian Daerah diwujudkan melalui Kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dan Pengelolaan Data Kepegawaian.
2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, Pengelolaan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
3) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

5.5.2 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas ASN melalui peningkatan kompetensi ASN. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada urusan pendidikan dan pelatihan, indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi sebesar 30,50.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), baik yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline*. Pelaksanaan diklat ini meliputi Diklat Teknis untuk pengembangan kompetensi teknis ASN, dan diklat kepemimpinan untuk pejabat pengawas, administrasi maupun pimpinan tinggi. Pelaksanaan diklat sudah mulai dirintis dengan menggunakan *e-learning* (MOOC), sehingga peserta diklat dapat lebih fleksibel ketika mengikuti kegiatan diklat. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

5.5.3 Pengawasan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Program dan kegiatan pada urusan ini juga mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada urusan Pengawasan, indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi sebesar 3,04;
- Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi sebesar 75,00;
- Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 3,0; dan
- Indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 3,025.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal di Kabupaten Kendal. Pengawasan internal ini meliputi pengawasan kinerja Pemda, melaksanakan reviu laporan keuangan yaitu LKPD dan LK OPD, tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut APIP. Diharapkan penilaian kinerja OPD semakin baik, dan temuan pemeriksaan BPK RI semakin berkurang. Selain itu juga dilaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu, yaitu ketia ada pelaporan dari masyarakat, adanya pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum ataupun perhitungan kerugiatan daerah/negara dan *probity audit.* Untuk mendukung kinerja, terdapat *updating* sistem pada SIMWASDAL dan

pengembangan *Whistle Blower System* (WBS), sehingga diharapkan semua kalangan bisa mengakses WBS. Program ini diwujudkan melalui Kegiatan:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Keuangan, dan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program ini dilaksanakan untuk pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan, penilaian reformasi birokrasi, pencegahan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan dalam evaluasi kertas kerja Reformasi Birokrasi, dan Sosialisasi Saber Pungli bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum sebagai langkah pencegahan Pungli di Kabupaten Kendal dan pendampingan terkait pelaporan LHKASN. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator Persentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan target sebesat 100%. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan dan asistensi, melalui sub kegiatan Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi; Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

5.5.4 Keuangan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada urusan Keuangan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan nilai 76,83;
- Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian;
- Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD sebesar 100%;
- Derajat Otonomi Fiskal Daerah sebesar 24,08%;
- Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,59%; dan

- Rasio Penggunaan alat perekam data transaksi (*tapping box*) wajib pajak sebesar 28,40%.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik, dengan tercapainya IPKD, kapasitas fiskal daerah dan pengelolaan belanja daerah. Pada program ini dilaksanakan pengelolaan belanja daerah agar sesuai dengan pendapatan daerah, penyaluran bantuan keuangan kepada desa termasuk DD dan ADD, pelaporan keuangan daerah dengan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Pada program ini juga dilaksanakan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran pada OPD, sehingga mendukung tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan tepat waktu.

Program ini diwujudkan melalui Kegiatan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan diantaranya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait; dan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan

Semesteran; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.

5) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mengelola aset daerah. Untuk membantu pengelolaan aset, saat ini sudah menggunakan SIM ASET, sehingga diharapkan pengelolaan aset menjadi lebih tertata dan transparan.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga; Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Inventarisasi Barang Milik Daerah; Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

c. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dilaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan, penyebarluasan kebijakan pajak daerah. Pendataan dan pemutakhiran objek pajak daerah juga dilaksanakan untuk memastikan wajib pajak sudah terdaftar, sehingga dapat menunaikan kewajiban pembayaran pajak. Optimalisasi realisasi penagihan juga menjadi prioritas, dengan melaksanakan penagihan pajak daerah dan jemput bola pembayaran pajak daerah, serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah. Pengelolaan dan pelaporan basis data pajak daerah dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga dilaksanakan pada program ini, untuk mendukung tercapainya target PAD. Dalam mendukung kinerja, saat ini sudah dibangun *e-pajak* yang rutin dilakukan pemeliharaan dan *updating* sistem, serta pembayaran PBB P2

direncanakan dapat melalui gerai *Indomart* maupun QRIS untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diwujudkan melalui Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.5.5 Perencanaan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran pencapaian kinerja, monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada urusan Perencanaan Pembangunan indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu :

- Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan sebesar 83,36; dan
- Nilai Perencanaan Dalam SAKIP dengan nilai 23,62;

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan nilai perencanaan dalam SAKIP dan meningkatkan capaian realisasi sasaran pembangunan daerah. Hal ini dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran belanja. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, juga dilaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program–program pada Perangkat Daerah. Pengendalian

dan evaluasi dilaksanakan melalui monitoring maupun desk dengan Perangkat Daerah terkait.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan sub kegiatan diantaranya Analisis Kondisi Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota; dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target capaian kinerja perangkat daerah melalui asistensi, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan bidang koordinator, yaitu Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Pemerintahan, Prasarawa Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan, diantaranya:

1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan diantaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

5.5.6 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada kegiatan riset dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah; serta kegiatan

perekayasaan, penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pada urusan penelitian dan pengembangan, indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu:

- Indek Inovasi Daerah dengan niai 52,45; dan
- Kapabilitas Inovasi sebesar 2,17.

Dalam upaya mencapai target tersebut, dilaksanakan program–program berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi inovasi yang dapat diimplementasikan, dan pelaksanaan penelitian maupun pengkajian yang relevan untuk pembangunan daerah maupun yang berdampak positif di masyarakat.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial; Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan; Penelitian dan Pengembangan Pariwisata; dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup; Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum; dan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
4) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif; Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan; dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

b. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan; Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan.
2) Invensi dan Inovasi dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi; Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Klaster Inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah; Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual; Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi; Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi; Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah; Pemantauan dan Evaluasi Invensi dan Inovasi; Penyusunan Kebijakan di Bidang Invensi dan Inovasi.

5.6 Unsur Pendukung Pemerintahan

5.6.1 Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 akan difokuskan pada perwujudan reformasi birokrasi dan pelayanan prima. Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah berperan sebagai koordinator pencapaian seluruh target-target pembangunan daerah. Hal tersebut diwujudkan dengan Sekretariat Daerah menjadi koordinator penyusunan POK, TPID, Tepra, SPBE, SPM, LKJIP, LKPJ dan SAKIP. Program dan kegiatan pada urusan ini juga dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan serta mendukung prioritas daerah yaitu Kendal Hebat : Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai akseptor pencapaian tujuan pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur Pembangunan.

Pada urusan Sekretariat Daerah indikator kinerja diarahkan pada pencapaian target kinerja yaitu:

- SAKIP Kabupaten sebesar 71,55;
- Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 83,15;